

**STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN
PADANG LAWAS**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi*

Oleh:

RAHMAT SUTAN SIREGAR

NPM : 2120040009



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

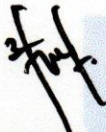
Nama : **RAHMAT SUTAN SIREGAR**
NPM : **2120040009**
Program Studi : **MAGISTER ILMU KOMUNIKASI**
Judul Tesis : **STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN
PADANG LAWAS**

Pengesahan Tesis

Medan, 12 September 2023

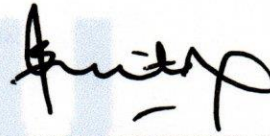
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si

Pembimbing II



Hj. RAHMANITA GINTING, M.Sc., Ph.D

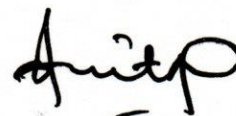
Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Hj. RAHMANITA GINTING, M.Sc., Ph.D

PENGESAHAN

**STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**

RAHMAT SUTAN SIREGAR

NPM : 2120040009

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi

“Tesis ini dipertahankan di hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyanggah Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom)

Pada hari Jumat, tanggal 12 September 2023

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si**
Ketua

2. **Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.**
Sekretaris

3. **Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos. M. I.Kom.**
Anggota

1.

2.

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN ORIGINALITAS

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



12 September 2023

Peneliti

RAHMAT SUTAN SIREGAR

NPM. 2120040009

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Sutan Siregar
NPM : 2120040009
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN
PADANG LAWAS”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa menerima izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Medan
Pada Tanggal : 12 September 2023



g menyatakan

RAHMAT SUTAN SIREGAR
NPM: 2120040009

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

RAHMAT SUTAN SIREGAR
NPM : 2120040009

ABSTRAK

Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa merupakan pendekatan yang digunakan oleh kepala desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat desa tentang alokasi dan penggunaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh kepala desa, faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini difokuskan pada Desa Handis Julu, Pagaran Baringin dan Sialambue. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Strategi komunikasi Kepala Desa menerapkan Pertemuan langsung, kegiatan sosialisasi, dan pemanfaatan media sosial. Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan dalam perencanaan, kesadaran tentang manfaat, penguatan keterampilan dan keterbukaan kepala desa. sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya informasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, perbedaan pendapat dan konflik, keterbatasan sumber daya dan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa

**STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI
KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**

**RAHMAT SUTAN SIREGAR
NPM : 2120040009**

ABSTRACT

The Communication Strategy of the Village Head in Village Fund Management is an approach employed by village heads to communicate with the village community regarding the allocation and utilization of village funds. This research aims to analyze the communication strategies implemented by village heads, as well as the driving and inhibiting factors of community participation in village fund management in the Barumun Subdistrict, Padang Lawas Regency. The study is focused on the villages of Handis Julu, Pagaran Baringin, and Sialambue. A qualitative descriptive approach is employed in this research with using interview, observation, and documentation methods. The findings of this study reveal that the Village Head's communication strategy involves direct meetings, socialization activities, and the utilization of social media. The driving factors for community participation in village fund management include transparency and accountability, involvement in planning, awareness of benefits, enhancement of skills, and the openness of the village head. On the other hand, inhibiting factors for community participation in village fund management include lack of information, distrust in the government, differences in opinions and conflicts, resource limitations, and ambiguity in roles and responsibilities.

Keywords: Communication Strategy, Community Participation, Village Fund Management

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis berjudul Strategi Komunikasi Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ini. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Hj. Rahmanita Ginting M.Sc, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi dan juga selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Thariq, S.Sos., M.I.Kom. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.

5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Leylia Khairani, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berarti dalam penelitian ini.
6. Desa Handis Julu, Desa Pagaran Baringin dan Desa Sialambue Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas yang telah kooperatif dan menerima peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Ayah, Alm. A. H. Siregar yang menitipkan pesan terakhirnya 16 jam sebelum dipanggil Allah SWT ke peristirahatan terakhir untuk peneliti melanjutkan jenjang S2 dan Ibu Hj. Siti Masmurni Nasution yang telah melangitkan doa-doanya sampai peneliti berada di titik ini.
8. Istri tercinta dan terkasih Eka Nova Sastri Haryati Hasibuan, ST yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan semangat untuk peneliti bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Keluarga tercinta, Abang AKP. Pinayungan Siregar dan Kakak Dewi Khairani Siregar, S.Pd, serta Anak-anak peneliti, Mohammad Rafid Al Hadi Siregar, Raesa Hayfa Dewi Siregar, Rayya Mecca Medina Siregar, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan tanpa henti selama penulisan tesis ini. Kebersamaan dan cinta kasih dari keluarga telah menjadi pilar utama dalam perjalanan akademis peneliti.
10. Rekan-rekan sesama mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Reguler B 2021 yang telah memberikan dukungan, ide, dan kontribusi yang berharga selama penulisan tesis ini. Diskusi dan tukar pikiran yang intensif dengan rekan-rekan telah menjadi wadah untuk memperkaya gagasan dan sudut pandang.

Tesis ini disusun dengan sebaik-baiknya dan berusaha mencerminkan hasil penelitian serta kontribusi orisinal peneliti. Namun, peneliti sadar bahwa karya ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, peneliti berharap bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang komunikasi organisasi. Semoga karya ilmiah ini juga dapat memberikan inspirasi bagi penelitian selanjutnya.

Medan, 12 September 2023
Peneliti,

RAHMAT SUTAN SIREGAR
NPM: 2120040009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Akademis.....	8
1.4.3 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Pembatasan Masalah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Strategi Komunikasi	10
2.2 Partisipasi Masyarakat.....	17
2.3 Pengelolaan Dana Desa	24
2.4 Kajian Penelitian Terdahulu	32
2.5 Kerangka Berpikir	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
3.1 Metode Penelitian.....	53
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	55
3.2.1 Subjek Penelitian	55
3.2.2 Objek Penelitian.....	56
3.3 Informan	57
3.4 Kategorisasi	58
3.5 Teknik Pengumpulan Data	60

3.6	Teknik Analisis Data	62
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	63
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		66
4.1	Hasil Penelitian.....	66
4.1.1	Deskripsi Lokasi Penelitian	66
4.1.2	Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	69
4.1.3	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa	75
4.1.4	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa	78
4.2	Pembahasan	93
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		99
5.1	Simpulan.....	99
5.2	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	52
Gambar 4.1 Kantor Camat Barumun	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Kabupaten Padang Lawas.....	4
Tabel 1.2 Realisasi Dana BLT Kabupaten Padang Lawas.....	5
Tabel 3.1 Kategorisasi.....	58
Tabel 3.2 Waktu Penelitian.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Strategi komunikasi yang sesuai agar dapat memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola Dana Desa. Kepala Desa perlu memiliki kemampuan dalam membangun hubungan yang positif dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki peran dalam penggunaan Dana Desa. Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai Dana Desa. Oleh karena itu, kepala Desa harus memiliki keterampilan dalam merancang strategi komunikasi yang efektif guna menjelaskan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat Desa dan menginspirasi partisipasi mereka dalam seluruh proses pengelolaannya.

Desa merupakan unit hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa, di sisi lain, merujuk pada pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa menjadi salah satu unsur utama dalam menjalankan tugas pemerintahan Desa dan diberikan dukungan oleh perangkat Desa. Tambahan pula, di setiap Desa terdapat suatu lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan, dengan

anggotanya dipilih berdasarkan representasi wilayah dan melalui proses demokratis. Lembaga ini dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Undang-undang Nomor 6, 2014).

Pemberian kewenangan kepada wilayah desa dalam konteks otonomi daerah merupakan langkah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dan mengelola dana desa. Ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dana desa memiliki peran signifikan dalam memajukan pembangunan, mengembangkan infrastruktur, dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dalam rangka memastikan efektivitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa, partisipasi aktif masyarakat serta terjalinnya komunikasi yang efisien antara kepala desa dan warganya menjadi sangat penting.

Kecamatan Barumon, yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, menjadi wilayah menarik untuk dijadikan objek penelitian terkait strategi komunikasi kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Tiga desa di dalam kecamatan tersebut, yaitu Desa Handis Julu, Desa Pagaran Baringin, dan Desa Sialambue, telah menunjukkan prestasi yang mengesankan dalam pengelolaan dana desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Meskipun demikian, penting untuk menginvestigasi lebih lanjut faktor-faktor yang mendukung kesuksesan ini agar kita dapat memahami kontribusi apa yang telah membantu mencapai prestasi tersebut.

Dana Desa merupakan sumber dana yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk Desa-Desa di Indonesia, yang kemudian dapat digunakan untuk keperluan

pembangunan serta perkembangan Desa tersebut. Dana ini diberikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa. Namun, pengelolaan Dana Desa seringkali mengalami masalah, seperti penyalahgunaan, penggunaan yang tidak tepat sasaran, atau bahkan korupsi. Satu dari berbagai alasan yang memicu isu ini adalah minimnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Hal ini telah diungkapkan dalam studi sebelumnya (Pangemanan, 2017) Ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pendidikan, status kependudukan, pekerjaan, usia, pengalaman, dan jenis kelamin; sementara faktor eksternal melibatkan tingkat interaksi, transparansi, dan kepemimpinan pemerintah Desa.

Pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan pengelolaan Dana Desa mengacu pada penyusunan rencana APB Desa berdasarkan RKP Desa yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Pelaksanaannya melibatkan persetujuan antara Kepala Desa dan BPD, di mana Kepala Desa mengesahkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, Kepala Desa mengkomunikasikan informasi terkait APB Desa kepada masyarakat melalui berbagai media informasi yang ada.

Penatausahaan finansial menjadi tanggung jawab Kaur Keuangan yang bertugas menjalankan fungsi kebendaharaan dalam mengelola keuangan. Pelaporan terkait penggunaan Dana Desa melibatkan langkah di mana Kepala Desa

menyampaikan laporan tentang pelaksanaan APB Desa dan capaian kegiatan di paruh pertama tahun kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Sementara itu, pertanggungjawaban terfokus pada aspek di mana Kepala Desa melaporkan hasil realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, pada akhir setiap tahun anggaran dan harus disampaikan paling lambat dalam waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menurut data dari Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara anggaran dana desa Kabupaten Padang Lawas Periode 12 Juli 2023 sebesar Rp. 227.794.661.000 dengan Tahap 1 pencairan sebesar Rp. 68.338.398.000 untuk 303 desa, dan realisasi dana desa dengan persentasi sebesar 30%. Seperti yang dijelaskan dari tabel dibawah ini:

Anggaran	Dana Desa Kabupaten Padang Lawas Periode 12 Juli 2023						Realisasi Dana Desa
	Tahap 1		Tahap 2		Tahap 3		68.338.398.300,00
227.794.661.000,00	68.338.398.300,00		0,00		0,00		30 %
	Desa Cair : 303	Belum Cair : 0	Desa Cair : 0	Belum Cair : 303	Desa Cair : 0	Belum Cair : 303	

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Kabupaten Padang Lawas
Sumber: <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/>, di akses 30 Juli 2023

Sedangkan untuk realisasi Dana BLT Kabupaten Padang Lawas Periode 12 Juli 2023 sebesar 7.597.800.000. Dengan TW 1 sebesar 6.865.200.000 untuk 303 Desa yang cair, TW 2 sebesar 732.600.000 untuk 34 desa yang cair dan 269 desa yang belum cair. Sehingga total penyaluran sebesar 75.936.198.300 atau sebesar 33,34%, seperti yang diterangkan pada tabel di bawah ini:

Realisasi Dana BLT Kabupaten Padang Lawas Periode 12 Juli 2023 : 7.597.800.000,00								Realokasi	Total Penyaluran
TW 1		TW 2		TW 3		TW 4			75.936.198.300,00
6.865.200.000,00		732.600.000,00		0,00		0,00		0,00	33.34 %
Desa Cair : 303	Belum Cair : 0	Desa Cair : 34	Belum Cair : 269	Desa Cair : 0	Belum Cair : 303	Desa Cair : 0	Belum Cair : 303		

Tabel 1.2 Realisasi Dana BLT Kabupaten Padang Lawas

Sumber: <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/>, di akses 30 Juli 2023

Manajemen keuangan di tingkat Desa melalui Dana Desa pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang bertujuan untuk membiayai program-program pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat dan kegiatan administrasi pemerintahan. Meskipun jumlah Dana Desa yang tersedia terbatas, namun mampu diarahkan untuk menjalankan kegiatan pembangunan di tingkat Desa. Tidak hanya itu, sebagian anggota masyarakat juga berpendapat bahwa kebijakan penggunaan dana Desa memberikan manfaat yang signifikan. Mekanisme penggunaannya dinilai lebih transparan dan melibatkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, serta pelaksanaannya lebih berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi (Kartika, 2012).

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam rangka ikut serta secara sukarela dalam program pembangunan, dimulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi. Hal ini diatur dalam Pasal 68 Ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi dalam aktivitas Desa, serta Pasal 68 Ayat 1 huruf (a) yang memberikan hak masyarakat untuk meminta informasi dari pemerintah Desa dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Partisipasi masyarakat tak hanya mencakup

pengambilan keputusan terkait program-program, tetapi juga melibatkan mereka dalam mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan mereka. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, keberhasilan program-program akan sulit dicapai. Meski demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih rendah, terutama karena mayoritas masyarakat di Desa tersebut berprofesi sebagai petani atau pekebun, yang membuat mereka sibuk dengan mata pencaharian di pertanian dan perdagangan yang memiliki ketergantungan tinggi pada sumber daya alam. Masyarakat Desa ini juga dikenal sebagai komunitas yang memiliki karakteristik swadaya, yang berarti mereka memiliki mata pencaharian yang serupa dan homogen dalam lingkungan mereka.

Ruang lingkup pemerintahan Desa, kepala Desa bertanggung jawab untuk mengelola dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat atau daerah. Dana Desa ini diperuntukkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di Desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Namun, dalam pengelolaan dana Desa seringkali terjadi masalah terkait partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan penggunaan dana Desa. Masyarakat sebagai pemilik dana Desa seharusnya memiliki peran aktif dalam mengawasi dan memastikan dana Desa digunakan secara tepat sasaran.

Faktor yang menyebabkan munculnya berbagai macam persoalan adalah masalah pendidikan, kesehatan bahkan masalah ekonomi. Hal ini disebabkan karena minimnya solusi dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Terkadang, pemerintah sering kali melaksanakan program pembangunan yang

tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, langkah yang diperlukan adalah fokus pada agenda pemberdayaan sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat (Novrianus, 2020). Faktor ini seringkali berasal dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran pengawasan dan partisipasi dalam manajemen dana Desa. Selain itu, Kepala Desa juga kadang-kadang tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait strategi komunikasi yang dapat efektif dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana Desa. Karena itu, diperlukan penelitian atau analisis lebih lanjut mengenai strategi komunikasi yang dapat berhasil meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa. Selain itu, identifikasi juga terhadap rintangan-rintangan yang umumnya dihadapi dalam penerapan strategi tersebut menjadi hal yang penting.

Pengelolaan dana desa memiliki peran vital dalam pembangunan desa. Dengan strategi komunikasi yang baik, kepala desa dapat menyampaikan informasi tentang alokasi dana dan proyek yang direncanakan kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa juga menjamin bahwa program dan proyek yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga, sehingga proses pembangunan desa dapat berlangsung dengan lebih efisien dan berkesinambungan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk kepada isu yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan diinvestigasi beberapa permasalahan, di antaranya:

1. Bagaimanakah Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ?
2. Apa sajakah Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada konteks masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang serta perumusan masalah oleh peneliti, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk menganalisis Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan manfaat dan pengetahuan dalam bidang pendidikan berupa ilmu pengetahuan tentang Strategi Komunikasi Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

1.4.2 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah berfungsi sebagai sumber rujukan bagi penelitian mendatang yang akan mengadopsi konsep yang sama.

1.4.3 Manfaat Praktis

a. Bagi Kecamatan Barumun

Untuk menambah wawasan dan pengalaman yang penuh tentang Strategi Komunikasi Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengalaman studi kasus dan menjadi referensi dalam pembuatan regulasi dengan Strategi Komunikasi Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

1.5 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian Strategi Komunikasi Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, khususnya di Desa Handis Julu, Desa Pagaran Baringin, dan Desa Sialambue.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Strategi Komunikasi

Strategi memiliki makna sebagai tindakan atau rencana yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, dalam prosesnya, strategi dalam pembangunan sering menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks karena berbagai masalah yang mungkin muncul. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan strategi dengan penuh kehati-hatian agar mengantisipasi kemungkinan hambatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi, menurut definisi dari Cragan dan Shield, adalah interaksi antara elemen-elemen konseptual yang memberikan informasi, penjelasan, evaluasi, atau perkiraan tentang tindakan manusia berdasarkan individu yang berkomunikasi (berbicara, membaca, mendengar, menonton) dalam periode waktu tertentu melalui berbagai media atau perantara (Cangara, 2014). Sementara pakar perencanaan komunikasi Middleton 1980 dalam (Cangara, 2014) mendefinisikan strategi komunikasi sebagai gabungan terbaik dari semua unsur komunikasi, mulai dari pengirim pesan, isi pesan, media komunikasi, penerima pesan, hingga dampak yang diharapkan (efek), yang direncanakan untuk mencapai tujuan komunikasi secara optimal (Astuti, 2021).

Segala kemajuan dalam bidang apapun saat ini, strategi komunikasi menjadi hal yang penting. Sukses komunikasi dapat sangat bergantung pada strategi yang diterapkan. Strategi komunikasi merupakan gabungan dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi

komunikasi harus memiliki kelenturan dalam pelaksanaannya, mampu menyesuaikan pendekatan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. Pemahaman terhadap karakteristik audiens dan dampak yang ditimbulkannya dalam strategi komunikasi sangat penting untuk memilih metode komunikasi yang sesuai, termasuk media yang akan digunakan (Effendy, 2015). Menurut Abidin (2015) Setiap kemajuan dalam suatu bidang pada saat ini memerlukan suatu strategi komunikasi yang efektif. Keberhasilan komunikasi seringkali ditentukan oleh strategi yang diterapkan. Strategi komunikasi merupakan hasil dari penggabungan perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi perlu menunjukkan fleksibilitas operasional, yang artinya pendekatan yang digunakan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi (Abidin, 2015).

Pada penelitian sebelumnya membahas Strategi komunikasi organisasi yang digunakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada SMP model Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu: Rapat koordinasi; Bimbingan Teknis; Pendampingan (Jonnedi *et al*, 2020). Memahami karakteristik komunikasi dan dampak yang dihasilkan oleh mereka merupakan dasar yang penting dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi merupakan metode untuk mengatur seluruh tahapan proses komunikasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna mencapai tujuan yang diinginkan (Heris, 2016).

Strategi Komunikasi melibatkan penetapan tujuan yang terdefinisi dengan baik, serta mempertimbangkan konteks dan keadaan audiens yang dituju. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam merancang strategi komunikasi menurut: (Abidin, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Mengenal Khalayak

Langkah pertama dalam merumuskan strategi komunikasi adalah memahami audiens dengan baik. Audiens bukanlah pihak pasif, melainkan memiliki peran aktif dalam proses komunikasi. Hubungan antara komunikator dan komunikan bukan hanya satu arah, tetapi bersifat saling mempengaruhi. Dalam menjalin komunikasi, perlu adanya kesamaan kepentingan antara komunikator dan komunikan.

2. Menyusun Pesan

Setelah memahami audiens dan situasi, langkah berikutnya adalah merumuskan pesan. Ini melibatkan menentukan tema dan isi pesan. Keberhasilan dalam mempengaruhi audiens bergantung pada kemampuan untuk menarik perhatian mereka. Prinsip *Attention To Action Procedure* (*AA Procedure*) diterapkan, di mana perhatian audiens diarahkan pada suatu pesan yang kemudian menggerakkan mereka untuk mengambil tindakan sesuai tujuan yang diinginkan.

3. Menetapkan Metode

Metode penyampaian pesan dalam komunikasi memiliki dua aspek, yaitu berdasarkan cara pelaksanaannya dan berdasarkan bentuk isinya. Hal cara pelaksanaan, metode *redundancy* (pengulangan) dan *canalizing*

(pengalihan) digunakan. Sedangkan berdasarkan bentuk isinya, terdapat metode informatif, persuasif, deduktif, dan kursif.

4. Seleksi dan Penggunaan Media

Penggunaan media sebagai alat untuk menyampaikan ide telah menjadi hal yang esensial dalam era modern. Media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi memiliki kemampuan untuk mencapai audiens dalam jumlah besar. Penggunaan media tidak hanya sebagai alat penyampai pesan, tetapi juga memiliki kompleksitas dalam fungsi-fungsi lainnya. Pemilihan media harus memperhitungkan faktor-faktor komunikasi dan kaitannya dengan situasi sosial-psikologis, karena setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai alat komunikasi.

5. Hambatan dalam Komunikasi

Selama proses penyampaian pesan, sering kali terjadi ketidakpahaman atau kesalahan pemahaman pesan. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan lambang atau bahasa yang digunakan oleh komunikator dan komunikan. Selain itu, hambatan teknis juga dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi antara kedua belah pihak.

Inti dari strategi komunikasi adalah perencanaan dan pengelolaan komunikasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Disiplin ini harus diorganisir secara berkelanjutan agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan faktor-faktor atau kondisi yang mempengaruhinya, dengan tujuan mencapai komunikasi yang efektif. Individu yang menerapkan strategi komunikasi harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sifat komunikasi dan konten pesan yang akan disampaikan.

Aspek ini sangat penting dalam menentukan media yang cocok dan metode komunikasi yang akan digunakan (Effendy, 2015).

Usaha untuk mempromosikan perkembangan wilayah, rencana yang matang sangat penting, karena kesuksesan promosi yang efektif sangat bergantung pada strategi komunikasi. Oleh karena itu, sebuah strategi dapat berhasil diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi utama dari strategi komunikasi terdiri dari dua hal, yaitu secara sistematis menyampaikan pesan komunikasi kepada khalayak target dengan tujuan informasi, persuasi, dan instruksi, guna mencapai hasil yang paling baik. Selain itu, juga berfungsi sebagai penghubung atau penengah dalam fenomena yang muncul sebagai dampak dari penggunaan dan operasional media yang sangat efektif. Jika tidak dikelola dengan baik, fenomena ini dapat merusak nilai-nilai yang telah dibangun (Effendy, 2015).

Priansa menyatakan bahwa pusat dari strategi pemasaran adalah pencapaian kinerja suatu entitas. Dalam konteks ini, fokus strategi pemasaran membentuk jembatan antara entitas dengan lingkungan, dan mengakui bahwa pemasaran memiliki peran yang lebih luas daripada aspek-aspek bisnis lainnya. Proses perumusan strategi pemasaran melibatkan empat tahap, yaitu analisis situasi strategis, pembentukan strategi pemasaran, pengembangan program pemasaran, serta implementasi dan pengawasan strategi pemasaran (Priansa, 2017).

Hubungan strategis antara komunikasi dan organisasi sangat kuat. Strategi komunikasi merujuk pada serangkaian langkah strategis yang diadopsi oleh sebuah organisasi untuk memastikan bahwa semua upaya komunikasinya mencapai tujuan

dengan efektif. Karakteristik strategi komunikasi terdapat dalam semua aspek komunikasi, namun mula-mula diprakarsai oleh pemikiran strategis yang dimiliki oleh pimpinan organisasi tertentu (Suryadi, 2018).

Onong Uchajana Effendy menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah hasil penggabungan antara perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, digunakan tahapan yang merupakan perpaduan dari model tahapan perencanaan komunikasi dan tahapan manajemen. Hafied Cangara dalam bukunya "Perencanaan dan Strategi Komunikasi" menguraikan bahwa tahapan perencanaan komunikasi melibatkan lima langkah, yakni Penelitian, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Sementara itu, menurut Bambang Hariadi dalam bukunya "Manajemen Strategi", proses manajemen strategi melibatkan tiga tahapan utama: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi (Effendy, 2015).

Menurut Hafied Cangara, strategi komunikasi memiliki lima tahap yang perlu dijalani (Cangara, 2014):

1. **Tahap Penelitian (*Research*)**

Sebuah organisasi atau entitas memerlukan ahli spesialis yang bertanggung jawab dalam menangani berbagai aspek komunikasi, seperti manajemen citra perusahaan atau kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh entitas tersebut, seperti potensi wabah penyakit yang dapat berdampak pada masyarakat atau dampak kerugian terhadap perusahaan. Fokus utama dari tahap ini adalah untuk menggali fakta-fakta atau isu-isu

yang ada, yang nantinya akan menjadi dasar dalam merancang strategi komunikasi yang efektif.

2. **Tahap Perencanaan (*Plan*)**

Tahap perencanaan, langkah-langkah mendatang diatur dan direncanakan untuk menetapkan tujuan strategis. Selain itu, dalam tahap ini strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti elemen-elemen penting dalam proses komunikasi adalah asal informasi (komunikator), isi pesan, saluran komunikasi (media), audiens yang dituju, dan dampak yang diharapkan. Pemilihan komunikator, media komunikasi, serta segmen audiens memiliki peranan sentral dalam mencapai hasil yang diinginkan.

3. **Tahap Pelaksanaan (*Execute*)**

Tahap implementasi adalah tahap di mana tindakan-tindakan dari strategi yang telah dirumuskan dilaksanakan. Dalam fase ini, terjadi koordinasi antar bagian atau divisi dalam organisasi untuk menjalankan strategi yang telah direncanakan. Implementasi strategi dapat mengambil bentuk beragam, seperti acara televisi, wawancara radio, iklan surat kabar, pemasangan spanduk, atau kelompok penyuluhan yang berinteraksi langsung dengan kelompok sasaran.

4. **Tahap Evaluasi (*Measure*)**

Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur hasil akhir dari aktivitas yang telah dijalankan. Ini mencakup penilaian terhadap efektivitas media yang digunakan, pencapaian tujuan strategi, pemahaman yang diperoleh oleh

penerima pesan, dan tindakan yang diambil oleh audiens setelah menerima informasi. Evaluasi penting karena hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan strategi di masa depan.

5. Tahap Pelaporan (*Report*)

Tahap akhir adalah pelaporan hasil strategi komunikasi yang telah dilakukan. Laporan ini merinci strategi komunikasi yang telah diimplementasikan. Laporan tersebut disusun dalam bentuk tulisan dan disampaikan kepada pihak yang berwenang sebagai materi pertimbangan dalam merancang program-program masa depan.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Istilah "partisipasi" sering dikaitkan dengan tindakan yang terhubung dengan proses pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pelayanan pemerintah. Konsep partisipasi memiliki makna yang sangat penting dalam kerangka kegiatan pembangunan.

Partisipasi merujuk pada keterlibatan emosional dan mental seseorang dalam lingkungan kelompok, yang mendorong mereka untuk mendukung pencapaian tujuan kelompok serta mengambil tanggung jawab atasnya. Partisipasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat (Dwiningrum, 2015).

Partisipasi mengacu pada keterlibatan perorangan dalam aktivitas kolektif untuk mencapai hasil dari program pembangunan yang tidak berhasil karena minimnya keterlibatan masyarakat. Kondisi ini bisa timbul karena sejumlah faktor, termasuk:

- a. Pembangunan hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat dan tidak memberi manfaat kepada mayoritas rakyat.
- b. Meskipun pembangunan dimaksudkan untuk keuntungan rakyat secara keseluruhan, tetapi rakyat mungkin kurang memahami tujuan tersebut.
- c. Walau sasaran pembangunan memberikan manfaat kepada penduduk dan warga mengerti, pelaksanaannya tidak selaras dengan pemahaman mereka.

Keterlibatan masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam keseluruhan rangkaian pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan harus melibatkan setiap tahapan dari awal hingga akhir. Karenanya, keterlibatan masyarakat dapat terwujud dalam empat tingkat:

1. Keterlibatan dalam tahap pengambilan keputusan.
2. Keterlibatan dalam pelaksanaan.
3. Keterlibatan dalam pemanfaatan hasil.

Penelitian terdahulu mengungkap partisipasi dijelaskan sebagai suatu langkah aktif yang dilakukan oleh individu dalam komunitas, dimana mereka mengambil inisiatif dengan menggunakan cara pandang dan penalaran mereka sendiri. Hal ini dilakukan melalui sarana dan proses tertentu (melalui lembaga dan mekanisme) yang memungkinkan mereka untuk mengontrol situasi dengan efektif (Putri, 2021). Cohen dan Uphoff (1977) dalam (Simamora, 2013) Menguraikan partisipasi menjadi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pengambilan Keputusan

Fase Pengambilan Keputusan. Fase pengambilan keputusan yang dimaksud di sini merujuk pada partisipasi masyarakat dalam pertemuan-pertemuan perencanaan dan pelaksanaan suatu program.

2. Tahap Pelaksanaan

Langkah paling krusial dalam proses pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah implementasinya.

3. Tahap menikmati hasil

Fase menikmati hasil yang bisa dijadikan sebagai ukuran keberhasilan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan menganggap masyarakat sebagai subjek pembangunan, semakin besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari proyek tersebut, menandakan berhasilnya pencapaian tujuan proyek.

4. Tahap evaluasi

Fase evaluasi dianggap penting karena partisipasi masyarakat dalam tahap ini memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan pelaksanaan proyek di masa yang akan datang. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya.

Keterlibatan warga merupakan faktor yang memengaruhi kesuksesan program pembangunan dan kemajuan di wilayah pedesaan. Diperlukan analisis mengenai bagaimana warga terlibat dalam usaha pemberdayaan serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan dan partisipasi mereka, agar upaya

pemberdayaan masyarakat dapat berlanjut dengan baik. Keterlibatan warga tidak sekadar melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk setiap program pembangunan, tetapi juga melibatkan mereka dalam mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada di lingkungan mereka. Tanpa keterlibatan warga, setiap usaha pembangunan tidak akan berhasil. Terlepas dari bentuknya, tujuan dari keterlibatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan, dengan cara melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan serta kegiatan-kegiatan yang mengikuti. Partisipasi warga dalam konteks politik yang kurang aktif, salah satu faktornya dapat disebabkan oleh popularitas rendah dari pelaku politik dalam masyarakat. Secara sederhana, popularitas ini berasal dari istilah "*electability*" yang mengindikasikan tingkat keterpilihan (Siregar *et al.*, 2023).

Secara sederhana partisipasi dapat dijelaskan sebagai keterlibatan individu, kelompok, atau komunitas dalam rangkaian program pembangunan. Pernyataan ini menyiratkan bahwa individu, kelompok, atau komunitas memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi atau dukungan yang bermanfaat dalam mendukung kelancaran program pembangunan melalui berbagai bentuk atau jenis partisipasi. Menurut pandangan yang dinyatakan oleh Hamijoyo dan Iskandar, bentuk-bentuk partisipasi dapat diperinci sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran

Keterlibatan ide, yang diberikan oleh peserta dalam forum, pertemuan, atau rapat.

2. Partisipasi tenaga

Keterlibatan tenaga yang diberikan oleh peserta dalam beragam kegiatan untuk memajukan atau membangun desa, memberikan bantuan kepada sesama, dan sejenisnya.

3. Partisipasi harta benda

Keterlibatan aset yang disumbangkan oleh individu dalam berbagai aktivitas guna kemajuan atau pembangunan desa, memberikan bantuan kepada sesama, dan sejenisnya.

4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran

Keterlibatan keterampilan dan keahlian yang diberikan oleh individu untuk mendorong berbagai bentuk usaha dan industri.

5. Partisipasi sosial

Keterlibatan sosial yang ditunjukkan oleh individu sebagai tanda solidaritas, contohnya berpartisipasi dalam arisan, koperasi, upacara berkabung, perayaan pernikahan, gotong royong, dan pertemuan bersama.

Efendi dalam (Dwiningrum, 2015) membagi partisipasi menjadi dua jenis, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

1. Partisipasi Vertikal

Dinamakan demikian karena terjadi dalam konteks di mana masyarakat terlibat atau terlibat dalam program yang diluncurkan oleh pihak lain.

Dalam dinamika ini, masyarakat berperan sebagai pihak yang lebih rendah, mengikuti, atau penerima, tergantung pada situasi yang ada.

2. Partisipasi Horizontal

Masyarakat memiliki fungsi yang proaktif, di mana setiap orang atau kelompok dalam masyarakat terlibat secara lateral atau sejajar satu sama lain. Jenis partisipasi ini mencerminkan langkah awal dalam pertumbuhan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk berkembang secara otonom.

Sebaliknya, menurut pendapat Basrowi dalam (Dwiningrum, 2015), partisipasi masyarakat dapat dilihat dan dibagi menjadi dua bentuk:

1. Partisipasi Non Fisik

Hal ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam menetapkan tujuan pendidikan nasional dan memicu minat masyarakat untuk mengejar pendidikan. Dengan demikian, pemerintah tidak akan menghadapi kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk bersekolah.

2. Partisipasi Fisik

Terlibat dalam upaya nyata di bidang pendidikan, seperti mendirikan serta mengoperasikan institusi pendidikan, mengorganisir program beasiswa, memberikan kontribusi dalam pembangunan fasilitas sekolah, dan menyediakan perpustakaan yang berisi buku atau jenis bantuan lainnya.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam (Dwiningrum, 2015), partisipasi dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Jenis partisipasi ini terkait dengan melibatkan masyarakat dalam mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mencapai kata sepakat mengenai gagasan-gagasan yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Partisipasi ini memiliki kepentingan besar karena masyarakat ingin turut serta dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunan. Dalam praktiknya, partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat mengambil berbagai bentuk, seperti hadir dalam rapat, berdiskusi, memberikan kontribusi pemikiran, memberikan tanggapan, atau menolak program yang diajukan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan kelanjutan dari rencana sebelumnya yang telah disepakati, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Dalam pelaksanaan program, peran berbagai elemen sangatlah vital, dengan peran pemerintah menjadi pusat perhatian utama atau sumber utama dalam proses pembangunan.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Jenis partisipasi ini terkait dengan hasil dari pelaksanaan program, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Dalam hal kuantitas, keberhasilan program akan tercermin dalam peningkatan "output". Dari sisi kualitas, evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pencapaian program sesuai dengan target yang ditetapkan atau tidak.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Tipe partisipasi ini berkaitan dengan evaluasi komprehensif pelaksanaan program. Tujuan dari bentuk partisipasi ini adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disusun atau apakah terjadi deviasi dari rencana tersebut.

Menurut Angel dalam (Firmansyah, 2018) pertumbuhan partisipasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa masalah. Pertama-tama, terdapat masalah dalam:

1. Tahap Perencanaan Pembangunan

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sepenuhnya masyarakat dalam mendukung upaya pembangunan yang telah diatur dan disetujui oleh pemerintah. Akibatnya, masyarakat cenderung mengambil sikap pasif dan berperan sebagai bawahan atau subordinate dari pemerintah.

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan di Lapangan

Rencana pembangunan yang diperancang dan disahkan oleh pemerintah dianggap sebagai keperluan masyarakat, sementara pembangunan yang didefinisikan atau disetujui oleh masyarakat dianggap sebagai aspirasi masyarakat yang mendapat sedikit prioritas.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan mengacu pada rangkaian langkah yang diperlukan oleh individu atau kelompok dengan niat mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu aspek yang kritis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi desa, terutama para aparat desa, adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen dana desa.

Kualitas ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengaturan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Manajemen Keuangan Desa, mengacu pada serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terkait sumber daya keuangan desa. Prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam mengelola keuangan desa meliputi transparansi, partisipatif, akuntabilitas, keteraturan, dan disiplin dalam penggunaan dana.

Manajemen dana desa perlu mewujudkan partisipasi masyarakat. Dalam rangka melibatkan masyarakat, pemerintah perlu menerapkan model swakelola, yang berarti mempromosikan pelaksanaan dan perencanaan yang dijalankan secara mandiri oleh masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan tenaga kerja dari wilayah tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan desa tidak bocor ke tempat lain. Untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, mekanisme pengawasan sangat diperlukan. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi risiko pelanggaran. Sanksi akan diterapkan pada individu atau pihak yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dana Desa merupakan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan khusus bagi Desa dan Desa Adat. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai aktivitas pemerintahan,

pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut (PP Nomor 8 Tahun 2016).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan peran desa dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan serta pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi kuasa kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Setiap tahun, alokasi anggaran Dana Desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada masing-masing desa sebagai salah satu sumber pendapatan. Langkah ini bertujuan untuk menggabungkan dan mengoptimalkan seluruh mekanisme alokasi dana dari Pemerintah menuju desa yang sudah ada sebelumnya.

Dana Desa merupakan komponen anggaran dalam APBN yang disediakan untuk keperluan desa, dan proses transfer dilakukan melalui APBD kabupaten/kota. Tujuan utama dari pemberian Dana Desa ini adalah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Distribusi Dana Desa dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, di mana setiap desa dan desa adat mendapatkan alokasi yang seimbang.

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa memiliki niat untuk mencapai tujuan-tujuan berikut: (1) meningkatkan pelayanan publik di lingkungan desa, (2) mengurangi angka kemiskinan, (3) merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah desa, (4) mengatasi disparitas pembangunan di antara desa-desa, dan (5) memberdayakan masyarakat desa agar turut serta aktif dalam rangka pembangunan.

Sumber pendapatan desa terdiri dari beberapa faktor, termasuk:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang diterima dari APBN
3. Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dari kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota
6. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga
7. Pendapatan lain yang sah dan sah dalam konteks desa

Pemerintah melegalkan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan proporsi sebesar 10% dari Dana Transfer Daerah, yang diimplementasikan secara bertahap. Penghitungan Dana Desa didasari oleh jumlah desa serta penempatan dana ini dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: a) populasi penduduk, b) tingkat kemiskinan, c) luas wilayah, dan d) tingkat kesulitan geografis. Perhitungan alokasi Dana Desa diatur melalui suatu rumus yang menggabungkan proporsi dan bobot sebagai berikut:

Alokasi dasar (90% dari total alokasi), dibagi merata di antara desa-desa.

Alokasi formula (10% dari total alokasi), dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Jumlah penduduk desa (25%)
- b. Tingkat kemiskinan desa (35%)
- c. Luas wilayah desa (10%)
- d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%)

Dana Desa adalah bagian dari anggaran APBN yang diarahkan untuk Desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Prioritasnya adalah mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Desa memiliki hak untuk melaksanakan sendiri tugas-tugas pemerintahannya yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Dalam rangka menjalankan hak ini, pemerintah Desa memiliki berbagai sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai aktivitas-aktivitas yang dilakukan (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2022).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa. Kepala Desa berfungsi sebagai Pengurus Kekayaan Pemisahan Kekayaan Desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan harta milik Desa yang dipisahkan. Saat melaksanakan kewenangan manajemen keuangan Desa, Kepala Desa memberikan wewenang sebagian kepada perangkat Desa yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Kekayaan Desa (PPKD). Pengalihan sebagian wewenang dari PKPKD kepada PPKD diatur melalui keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.

Sebagai kepala pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki peran sebagai pengelola keuangan Desa dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah Desa dalam kepemilikan harta Desa. Kepala Desa memiliki hak dan kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa
- c. Menetapkan Kaur Keuangan

- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa
- e. Menetapkan tugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa

Tim Pengelola Keuangan Desa (PPKD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur/kasi, dan Kaur Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, tugas Sekretaris Desa adalah bertindak sebagai koordinator PPKD. Kaur dan kasi bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas anggaran. Sementara itu, kaur keuangan menjalankan fungsi keuangan dan bertanggung jawab untuk merancang Rencana Kerja Anggaran Desa (RKA Desa), melakukan pencatatan termasuk penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengaturan, dan pertanggungjawaban pendapatan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Bab IV Pasal 29 tentang pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendukung biaya pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, upaya

pembinaan sosial, serta inisiatif pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, disingkat APB Desa, merujuk pada rencana keuangan tahunan pemerintahan di tingkat Desa.

Ada beberapa faktor yang mendorong Desa untuk mencari sumber pendapatan, di antaranya:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terbatas dan ketergantungan pada bantuan yang juga minim;
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa yang rendah menyulitkan Desa dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang substansial;
3. Masalah ini juga berdampak pada keterbatasan dana operasional Desa untuk menyediakan layanan publik;
4. Banyak program pembangunan yang diintegrasikan ke Desa, tetapi kendali penuh atas program-program tersebut tetap dipegang oleh instansi pemerintah pusat. Pendekatan semacam ini sering kali menuai kritik karena kurang memberikan peluang pembelajaran kepada Desa dan karena sifatnya yang *top-down*, tidak selaras dengan kebutuhan dan aspirasi Desa serta warganya (Putra *et al.*, 2013).

Menjawab masalah tersebut, pemerintah mengaplikasikan bantuan keuangan kepada Desa yang termasuk dalam dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang minimalnya 10 persen dan dikenal sebagai Dana Desa. Inti dari pemberian Dana Desa sebenarnya adalah memberikan dorongan finansial atau dana insentif guna mendorong dukungan dalam membiayai program-program

pemerintah Desa, yang didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan melalui kontribusi swadaya gotong royong.

a. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai wewenang Desa

Upaya pemulihan ekonomi nasional sesuai otoritas Desa termasuk: mendirikan, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersama-sama; pengembangan usaha ekonomi produktif yang terutama dikelola oleh BUMDesa; serta pengembangan bidang pariwisata di Desa.

b. Program Prioritas Nasional sesuai wewenang Desa

Program prioritas nasional yang sesuai dengan lingkup Desa meliputi: Peningkatan akurasi dan konsolidasi data SDGs Desa dan pemantauan perkembangan Desa melalui indeks Desa Berkembang; Kemandirian pangan melalui tanaman dan hewan; Peningkatan upaya pencegahan dan penurunan angka stunting; Peningkatan kualitas SDM warga Desa; Menggalakkan partisipasi luas masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan Desa; Perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan wewenang Desa; Batas maksimum 3% dari alokasi Dana Desa untuk dana operasional pemerintahan Desa; Penanganan kemiskinan khususnya pada tingkat yang sangat rendah; dan Bantuan Keuangan Langsung Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan yang sangat parah.

c. Upaya Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Alam dan Non-alam sesuai wewenang Desa

Langkah-langkah mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam dalam batasan otoritas Desa termasuk tindakan untuk mengatasi bencana alam serta bencana non-alam.

Tata kelola keuangan Desa yang diamanatkan pemerintah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterbukaan, tanggung jawab hukum, serta partisipasi masyarakat, dan dilaksanakan secara teratur dan kedisiplinan. Dalam hal transparansi, ini berarti pengelolaan dilakukan dengan keterbukaan; dalam hal akuntabilitas, ini berarti pertanggungjawaban yang sah secara hukum; dan dalam hal partisipasi, ini melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya. Pengelolaan keuangan Desa harus dicatat secara benar sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan yang telah ditetapkan (Nurcholis, 2011).

2.4 Kajian Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya dilakukan dengan tujuan mendapatkan materi pembandingan dan titik rujukan. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk menghindari pandangan bahwa penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam tinjauan literatur ini, penulis memasukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian Riau Simamora (2021)

Penelitian Riau Simamora (2021) berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lobutua Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk memahami tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua, yang terletak di Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, masih belum mencapai tingkat aktifitas yang optimal dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil.

2. Penelitian Nikodimus (2018)

Penelitian Nikodimus (2018) berjudul Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis, deskripsi, dan eksplanasi mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait dengan tantangan dan usaha-usaha untuk memperbaiki kondisi pembangunan di Desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif dan deskriptif. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembangunan masih memiliki kelemahan yang signifikan. Upaya strategis yang dijalankan oleh Kepala Desa dalam memperkuat partisipasi warga Desa dalam proses pembangunan Desa terdiri dari penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan yang tersebar secara merata di berbagai

dusun di wilayah Desa, khususnya di Kecamatan Barumun. Upaya lain yang dilakukan oleh unsur-unsur Desa dalam konteks pembangunan melibatkan koordinasi, musyawarah, serta kesepakatan antara aparat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyatukan berbagai pandangan dan pemikiran guna mendorong kemajuan daerah atau Desa mereka.

3. Penelitian Rahmat Ageng Minanto, Pudji Muljono dan Hamzah (2016)

Penelitian Rahmat Ageng Minanto, Pudji Muljono dan Hamzah (2016) berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Karya Bahari” (Kasus: Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengenal pasti korelasi antara peran kepemimpinan Kepala Desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan dukungan data kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Kepala Desa masuk dalam kategori yang tinggi, sementara tingkat partisipasi masyarakat tergolong rendah. Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan antara peran kepemimpinan Kepala Desa dan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program BUMDes. Hubungan ini muncul karena Kepala Desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes.

4. Penelitian Dewi Listyawati, Sarmiati, dan Asmawi (2019)

Penelitian Dewi Listyawati, Sarmiati, dan Asmawi (2019) berjudul Komunikasi Perangkat Nagari Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendorong Pemerintah untuk berkolaborasi dalam musyawarah dengan masyarakat dalam rangka penyaluran dana Desa, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses tersebut, karena pengawasan yang efektif dapat dilakukan oleh masyarakat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berlangsung antara masyarakat dan pemerintah dalam konteks pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri dapat dianggap sebagai masukan bagi pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan yang mendesak. Kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dana Desa serta partisipasi aktif dalam setiap tahapan yang berkaitan dengan program dana Desa berperan penting dalam menjalankan proses pembangunan Desa secara lancar.

5. Penelitian Satria Mentari Tumbel (2017)

Penelitian Satria Mentari Tumbel (2017) berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencapai pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan

pembangunan masih terbatas. Terlihat bahwa sebagian besar pekerjaan dan keterlibatan aktif dalam proses pembangunan dilakukan oleh staf Desa. Beberapa program juga belum berhasil diimplementasikan sepenuhnya. Sementara dalam penggunaan hasil pembangunan, partisipasi masyarakat masih belum optimal, dan hasil pembangunan digunakan untuk kepentingan umum di berbagai aspek. Tingkat partisipasi dalam evaluasi program juga rendah, yang tercermin dalam minimnya partisipan dalam rapat-rapat evaluasi program.

6. Penelitian Arapah (2019)

Penelitian Arapah (2019) berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Perkampungan Suku Gayo Dan Perkampungan Suku Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola dana Desa, jenis pembangunan yang sudah terwujud, serta faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat partisipasi masyarakat. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang melibatkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model interaktif. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat di Blang Rongka dan Mekar Ayu sudah terlibat dalam pengelolaan dana Desa, walaupun partisipasi dari kalangan perempuan masih minim. Partisipasi masyarakat di Blang Rongka masih fokus pada tahap perencanaan. Di sisi lain, masyarakat di Mekar Ayu telah

terlibat dalam semua tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan atau evaluasi.

7. Penelitian Nur Inayatul Ainah (2020)

Penelitian Nur Inayatul Ainah (2020) berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyash. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana Desa di Desa Sinar Bandung, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perspektif Fiqh Siyash terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), yaitu pendekatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data dan fakta di lapangan, khususnya di Desa Sinar Bandung, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Sinar Bandung dalam pengawasan pengelolaan dana Desa masih belum sepenuhnya aktif, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 68 ayat 2 huruf (e) dan ayat 1 huruf (a) UU nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mendukung. Dalam pandangan Islam, keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan, seperti yang tercermin dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 dalam Al-Qur'an, yang menggarisbawahi bahwa perubahan suatu kaum harus dimulai dengan upaya nyata untuk

mencapai tujuan dan peningkatan kehidupan. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, partisipasi masyarakat seharusnya memiliki tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, dalam konteks Desa Sinar Bandung, partisipasi masyarakat dalam meraih kemaslahatan dalam Fiqh Siyasah belum berjalan secara optimal.

8. Penelitian Imam Fathoni (2021)

Penelitian Imam Fathoni (2021) berjudul Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Rowotamtu Rambipuji Jember.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi metode yang digunakan oleh Desa dalam menyampaikan informasi mengenai alokasi dana Desa kepada masyarakat, serta untuk mengidentifikasi berbagai media yang dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan informasi tersebut kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam jenis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa menggunakan empat cara untuk menyediakan informasi tentang alokasi dana Desa kepada masyarakat. Pertama, menggunakan baliho yang dipasang di depan kantor Desa. Kedua, melalui rapat-rapat yang melibatkan seluruh struktur organisasi Desa. Ketiga, melalui program-program yang dilakukan oleh karang taruna atau BUMDes. Terakhir, informasi juga disampaikan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, ada dua jenis media yang digunakan untuk memberikan informasi tentang alokasi dana Desa kepada

masyarakat. Media offline meliputi baliho, rapat tingkat RT dan RW, kegiatan karang taruna, pemberian bantuan langsung kepada masyarakat, papan informasi, plang pembangunan, dan prasasti setelah selesainya pembangunan. Sedangkan media online melibatkan grup WhatsApp yang terbagi berdasarkan divisi dan website resmi informasi Desa.

9. Penelitian Milda Nur Faizatur Rahma (2020)

Penelitian Milda Nur Faizatur Rahma (2020) berjudul Strategi Komunikasi Pembangunan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang digunakan dalam proses pembangunan di Desa Sumari, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Sumari, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, strategi komunikasi yang digunakan adalah sebagai cara untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat terkait kegiatan pembangunan Desa. Namun, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi komunikasi ini, yakni bahwa dana Desa yang diberikan oleh pemerintah masih belum mencukupi untuk mendukung sepenuhnya kegiatan pembangunan di Desa Sumari.

10. Penelitian Yunus (2016)

Penelitian Yunus (2016) berjudul Perencanaan Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Di Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana Kepala Desa berkomunikasi dalam menyampaikan informasi terkait pembangunan kepada masyarakat, serta bagaimana Kepala Desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepala Desa. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kapuak, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, Kepala Desa berkomunikasi dengan masyarakat. Program-program perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Kapuak.

Perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian sekarang, dapat dilihat di bawah ini:

1. Persamaan Penelitian Riau Simamora (2021) dengan penelitian sekarang Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa dan Metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian sekarang membahas strategi komunikasi Kepala Desa dengan menggunakan Teori yang ada dalam bidang komunikasi pembangunan dan sosial.
2. Persamaan Penelitian Nikodimus (2018) dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan strategi komunikasi kepala Desa dan

menggunakan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian sekarang membahas tentang Dana Desa.

3. Persamaan Penelitian Rahmat Ageng Minanto, Pudji Muljono dan Hamzah (2016) dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan Partisipasi Masyarakat. Sedangkan perbedaannya pada penelitian sekarang membahas strategi komunikasi Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa dan metode penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.
4. Persamaan Penelitian Dewi Listyawati, Sarmiati, dan Asmawi (2019) dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Sedangkan perbedaannya pada penelitian sekarang terletak pada strategi komunikasi Kepala Desa dengan Komunikasi Perangkat Desa.
5. Persamaan Penelitian Satria Mentari Tumbel (2017) dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dan Metode Penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada tidak ada pembahasan tentang strategi komunikasi Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa.
6. Persamaan Penelitian Arapah (2019) dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang juga melihat strategi komunikasi Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokus penelitiannya.

7. Persamaan Penelitian Nur Inayatul Ainah (2020) dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu melihat dari perspektif Fiqh Siyash dan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian Survey Lapangan sementara penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.
8. Persamaan Penelitian Imam Fathoni (2021) dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan tentang strategi komunikasi yang berada di tingkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Peneliti sekarang juga menggunakan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian sekarang lebih fokus kepada strategi komunikasi Kepala Desa dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Dana Desa.
9. Persamaan Penelitian Milda Nur Faizatur Rahma (2020) dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan strategi komunikasi dalam pembangunan Desa, dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya, penelitian sekarang membahas tentang strategi komunikasi Kepala Desa dan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.
10. Persamaan Penelitian Yunus (2016) dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan komunikasi Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian sekarang membahas tentang pengelolaan Dana Desa sementara penelitian terdahulu membahas tentang pembangunan daerah.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah metode yang digunakan untuk merangkai dan menggambarkan berbagai konsep, ide, atau elemen yang terkait dengan suatu topik tertentu. Bagan berikut digunakan untuk menjelaskan strategi komunikasi kepala desa dalam pengelolaan dana desa, termasuk lima strategi komunikasi kepala desa yang dapat dimasukkan ke dalam kerangka berpikir tersebut. Strategi-strategi komunikasi tersebut meliputi mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, seleksi dan penggunaan media, serta menghadapi hambatan dalam komunikasi. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sebagai faktor yang saling terkait dalam konteks strategi komunikasi kepala desa.

Kelima strategi tersebut mencakup langkah-langkah berikut:

1. Mengenal Khalayak

Kepala desa perlu mampu menyusun pesan yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pesan tersebut harus mencakup informasi yang penting terkait pengelolaan dana desa, manfaatnya bagi masyarakat, serta bagaimana partisipasi mereka dapat membantu dalam pembangunan desa. Pesan yang jelas dan informatif akan memotivasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif. Komunikasi kepala desa harus menghindari penggunaan bahasa teknis atau istilah yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa yang sederhana dan akrab akan memudahkan masyarakat dalam memahami informasi yang disampaikan. Hal ini juga akan meminimalisir kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih baik antara kepala

desa dan masyarakat. Pendekatan personal dalam komunikasi sangat penting. Kepala desa dapat menggunakan contoh konkret dan cerita nyata yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Dengan memperlihatkan dampak positif pengelolaan dana desa bagi masyarakat secara personal, kepala desa dapat membangun rasa saling pengertian dan empati, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi. Strategi komunikasi kepala desa juga harus melibatkan masyarakat dalam diskusi terbuka. Ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbicara tentang harapan, kekhawatiran, dan ide mereka terkait pengelolaan dana desa. Diskusi ini dapat diadakan dalam bentuk pertemuan atau forum terbuka, sehingga masyarakat merasa memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

2. Menyusun Pesan

Kepala desa perlu memilih metode komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Berbagai metode bisa digunakan, seperti pertemuan langsung, diskusi kelompok, sosialisasi, brosur, spanduk, dan media sosial. Pemilihan metode harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat, tingkat aksesibilitas, dan preferensi komunikasi masyarakat. Kepala desa dapat memanfaatkan cerita dan contoh nyata yang relevan untuk memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Contohnya bisa berupa kisah sukses pengelolaan dana desa di desa lain, atau bagaimana dana desa telah memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Cerita-cerita ini akan membantu masyarakat merasa terhubung dengan informasi yang disampaikan. Selain menyampaikan informasi, kepala desa perlu

merancang pesan yang merangsang keterlibatan aktif masyarakat. Pesan tersebut bisa berisi ajakan untuk berpartisipasi dalam diskusi, memberikan masukan, atau terlibat dalam kegiatan terkait pengelolaan dana desa. Dengan merasa terlibat, masyarakat akan lebih cenderung untuk berpartisipasi. Pesan yang disampaikan harus mendorong masyarakat untuk bertanya atau mengajukan klarifikasi jika ada hal yang belum dipahami dengan baik. Kepala desa harus siap menjawab pertanyaan dengan jelas dan terbuka, sehingga tidak ada kebingungan di pihak masyarakat. Keterbukaan dalam menjawab pertanyaan akan membangun kepercayaan masyarakat. Dalam pesan yang disampaikan, kepala desa harus menekankan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat dari pengelolaan dana desa. Informasi tentang proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa dan dampaknya bagi masyarakat harus disampaikan secara gamblang. Dengan melihat manfaat konkret, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat. Setelah memahami khalayaknya, kepala desa perlu menyusun pesan yang jelas, relevan, dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Pesan tersebut harus mengkomunikasikan informasi tentang alokasi dan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Kepala desa harus menjaga konsistensi dalam menyampaikan pesan. Pesan yang sama perlu disampaikan secara berulang-ulang melalui berbagai metode komunikasi. Selain itu, komunikasi harus bersifat berkelanjutan, tidak hanya saat ada agenda tertentu. Ini akan membangun kesan bahwa pengelolaan dana desa adalah hal penting dan kontinu.

3. Menetapkan Metode

Setelah strategi komunikasi diimplementasikan, kepala desa perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengukur tingkat partisipasi masyarakat, tingkat pemahaman terhadap informasi yang disampaikan, dan dampak yang terlihat setelah implementasi strategi komunikasi. Jika ditemukan kendala atau perlu penyesuaian, kepala desa harus siap untuk mengubah strategi komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan respons masyarakat. Kepala desa harus aktif dalam menggali umpan balik dari masyarakat terkait strategi komunikasi yang telah dilakukan. Umpan balik ini bisa berasal dari pertemuan langsung, diskusi kelompok, atau melalui media sosial. Umpan balik masyarakat dapat memberikan wawasan berharga tentang apakah pesan telah sampai dengan baik, apakah terdapat kebingungan, dan apa yang dapat ditingkatkan. Lingkungan dan kebutuhan masyarakat bisa berubah dari waktu ke waktu. Kepala desa harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan memodifikasi strategi komunikasi jika diperlukan. Misalnya, jika masyarakat semakin aktif menggunakan media sosial, kepala desa harus mempertimbangkan untuk lebih aktif di platform tersebut untuk tetap terhubung dengan masyarakat. Kepala desa juga bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat, kelompok pemuda, atau kelompok-kelompok lain yang memiliki pengaruh di desa. Melibatkan kolaborasi ini dapat membantu dalam menyebarkan informasi lebih luas dan mendalam, serta meningkatkan partisipasi melalui pengaruh sosial. Kepala desa perlu

memantau reaksi dan tanggapan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan. Jika terdapat kebingungan atau kesalahpahaman yang umum di kalangan masyarakat, kepala desa dapat merespons dengan memberikan klarifikasi melalui metode komunikasi yang telah ditetapkan. Kepala desa juga harus mempertimbangkan waktu yang paling tepat untuk menyampaikan pesan. Misalnya, jika mayoritas masyarakat lebih luang pada akhir pekan, maka pertemuan atau sosialisasi bisa dijadwalkan pada waktu tersebut. Fleksibilitas dalam jadwal komunikasi akan memastikan bahwa pesan dapat diterima dengan baik oleh target audiens. Selain hanya memberikan informasi, kepala desa juga harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Strategi komunikasi harus dirancang untuk mengajak masyarakat untuk berdiskusi, memberikan masukan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa. Dengan melibatkan masyarakat, strategi komunikasi akan lebih efektif dalam mencapai tujuan partisipasi yang lebih aktif.

Kepala desa harus menentukan metode komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Metode ini dapat berupa pertemuan langsung, media sosial, baliho, atau media lain yang sesuai dengan preferensi dan aksesibilitas masyarakat desa.

4. Seleksi dan Penggunaan Media

Kepala desa juga harus mempertimbangkan bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Pesan yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga informasi dapat diserap

dengan baik. Gaya komunikasi juga perlu disesuaikan dengan budaya dan norma-norma komunikasi masyarakat desa untuk memastikan pesan tersampaikan secara efektif. Kepala desa dapat membentuk tim komunikasi yang terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Tim ini dapat membantu dalam menyebarkan informasi, mendengarkan umpan balik, dan menjalankan kegiatan komunikasi yang lebih luas. Pemberdayaan tim komunikasi akan membantu dalam menjangkau lebih banyak masyarakat dengan cara yang lebih efisien. Strategi komunikasi kepala desa juga harus diselaraskan dengan agenda dan prioritas pembangunan desa. Misalnya, jika ada proyek pembangunan yang sedang berjalan, kepala desa dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk mengkomunikasikan informasi tentang penggunaan dana desa dan manfaatnya bagi masyarakat. Kepala desa dapat mengumpulkan cerita sukses atau contoh konkret bagaimana dana desa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Cerita-cerita ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengilustrasikan manfaat nyata dari partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Cerita-cerita sukses juga dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif terlibat. Kepala desa dapat menyediakan bahan pustaka atau materi tertulis yang menjelaskan secara rinci tentang pengelolaan dana desa. Bahan-bahan ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang alokasi dana desa, perencanaan, dan manfaatnya. Bahan pustaka dapat disimpan di kantor desa atau tempat-tempat umum lainnya. Kepala desa dapat memfasilitasi diskusi

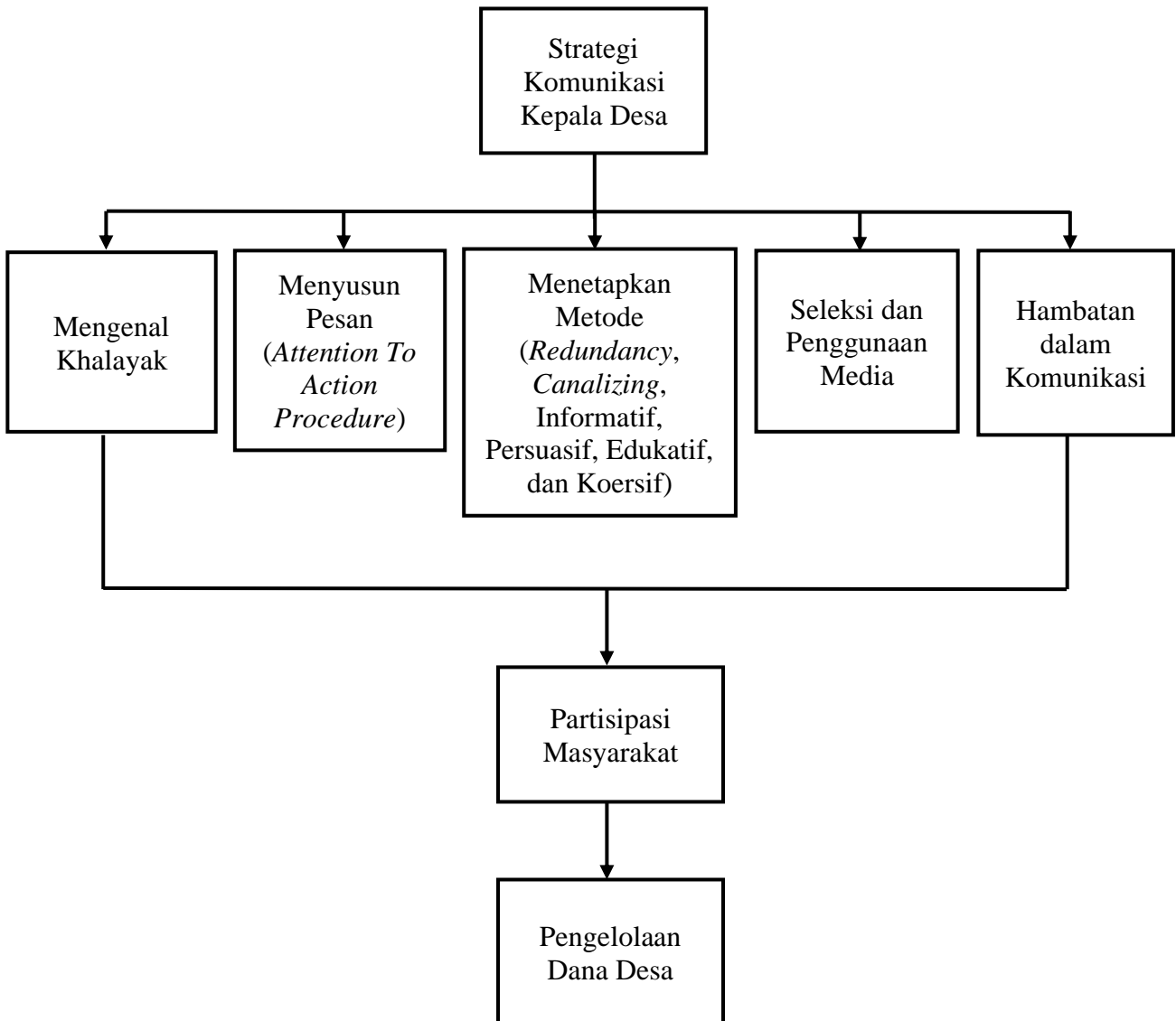
dan forum terbuka di desa untuk membahas tentang pengelolaan dana desa. Diskusi ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi pendapat, bertanya, dan mengemukakan ide-ide terkait pengelolaan dana desa. Fasilitasi diskusi ini akan mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat. Kepala desa dapat memanfaatkan acara-acara atau kegiatan desa yang sudah ada sebagai kesempatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Misalnya, saat acara peringatan hari jadi desa atau acara adat, kepala desa dapat mengambil kesempatan untuk menyampaikan informasi terkait dana desa kepada khalayak yang lebih luas. Dalam penyampaian pesan, kepala desa dapat menggunakan analogi atau perbandingan untuk menjelaskan konsep pengelolaan dana desa secara lebih konkret. Misalnya, dengan membuat perbandingan bagaimana dana desa dapat disamakan dengan anggaran keluarga, kepala desa dapat membantu masyarakat memahami konsep pengelolaan dana secara lebih visual. Memilih media yang tepat juga penting dalam strategi komunikasi. Kepala desa harus mempertimbangkan media yang paling efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan kepada khalayaknya. Penggunaan media yang tepat dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat.

5. Menghadapi Hambatan dalam Komunikasi

Kepala desa harus mampu mengadaptasi pesan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Misalnya, jika ada aspek teknis dalam pengelolaan dana desa yang sulit dimengerti oleh sebagian masyarakat, kepala desa perlu mencari cara untuk menjelaskan dengan

bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Selain menggunakan metode komunikasi satu arah, kepala desa juga dapat menerapkan pendekatan komunikasi yang lebih interaktif. Misalnya, melalui sesi tanya jawab, diskusi terbuka, atau wadah umpan balik. Pendekatan interaktif ini akan membantu masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif. Jika terdapat ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh kepala desa, penting untuk membangun hubungan yang kuat dan meyakinkan. Kepala desa perlu mendemonstrasikan komitmen dan integritas dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat merasa lebih percaya dan terbuka terhadap informasi yang diberikan. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi adalah dengan menggunakan contoh nyata atau kasus yang pernah terjadi. Menggunakan contoh nyata akan membantu masyarakat menghubungkan informasi dengan situasi sehari-hari yang lebih mudah dipahami. Kepala desa juga dapat menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, seperti LSM atau tokoh masyarakat, untuk membantu dalam penyampaian informasi dan komunikasi terkait dana desa. Kemitraan ini dapat memberikan legitimasi lebih kepada informasi yang disampaikan. Kepala desa dapat memberikan pelatihan atau edukasi khusus kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat dapat merasa lebih percaya diri dan kompeten dalam berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa perlu memahami budaya dan norma-norma komunikasi

masyarakat desa. Misalnya, jika terdapat kebiasaan untuk berkumpul dan berdiskusi di tempat tertentu, kepala desa dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk menyampaikan informasi terkait dana desa. Memahami struktur sosial masyarakat desa dapat membantu kepala desa dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih tepat. Misalnya, mengidentifikasi tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di desa dan melibatkan mereka dalam penyampaian informasi. Kepala desa perlu mengukur efektivitas dari strategi komunikasi yang diterapkan. Ini dapat dilakukan melalui pemantauan partisipasi masyarakat, tingkat pemahaman, dan umpan balik dari masyarakat. Dengan mengukur efektivitas, kepala desa dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kepala desa harus bersikap terbuka terhadap umpan balik yang diberikan oleh masyarakat. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari masyarakat terkait informasi yang disampaikan, kepala desa harus siap untuk menjawab dan memberikan klarifikasi yang diperlukan. Setelah penyampaian informasi, kepala desa dapat melibatkan masyarakat dalam evaluasi efektivitas strategi komunikasi. Terdapat berbagai hambatan yang dapat mengganggu efektivitas komunikasi. Kepala desa perlu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti keterbatasan akses informasi atau perbedaan bahasa dan budaya.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Sumber: Peneliti (2023)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif sebagai pendekatannya, dengan fokus pada pengamatan yang akurat dan mendalam di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang menekankan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak dan absolut, melainkan berfokus pada interpretasi dan pemahaman yang lebih mendalam (Mulyana, 2013).

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dengan perspektif yang komprehensif. Peneliti lebih tertarik pada interpretasi dan makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan daripada mengukur atau menghitung secara kuantitatif.

Pada awal penelitian kualitatif, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang terbuka dan luas, mengundang partisipan untuk berbicara dan berbagi pandangan mereka. Partisipan yang dipilih harus memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti, sehingga mereka bisa memberikan pandangan yang relevan. Pengumpulan data dalam metode kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan partisipan, observasi langsung terhadap situasi atau interaksi yang terjadi, serta analisis dokumen dan materi terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna yang muncul dari data tersebut.

Proses analisis dalam penelitian kualitatif melibatkan penafsiran dan pemahaman mendalam terhadap data. Peneliti menggali konsep-konsep, perspektif, dan interaksi yang menggambarkan fenomena yang diteliti. Metode ini cenderung menghasilkan deskripsi yang lebih mendalam dan kontekstual tentang fenomena tersebut.

Hasil dari analisis kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Peneliti dapat menemukan pola-pola unik, variasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut. Kesimpulan dan temuan dari penelitian kualitatif biasanya bersifat deskriptif, menggambarkan bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Fokus utama adalah pada pemahaman dan pengungkapan makna yang ada dalam fenomena. Metode penelitian kualitatif sangat sesuai untuk menjelajahi aspek kompleks yang sulit diukur secara kuantitatif, seperti motivasi, persepsi, interaksi sosial, dan pengalaman individu.

Metode penelitian secara esensial adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan maksud tertentu. Dalam konteks ini, terdapat empat elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu pendekatan ilmiah, pengumpulan data, tujuan, dan manfaat. Pendekatan ilmiah mengacu pada prinsip-prinsip keilmuan, yang melibatkan rasionalitas, pengalaman empiris, dan pendekatan yang terorganisir (Sugiyono, 2017).

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk kepada individu, kelompok, atau entitas yang menjadi fokus atau obyek dari studi penelitian. Subjek adalah pihak yang memberikan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan studi tersebut.

Konteks penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, subjek penelitian merujuk kepada masyarakat desa yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Ini bisa mencakup beragam individu dan kelompok seperti anggota masyarakat desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, atau organisasi masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan dana desa.

Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada relevansi mereka terhadap topik yang diteliti dan kemampuan mereka untuk memberikan wawasan dan informasi yang kaya tentang fenomena yang sedang dipelajari. Subjek penelitian tersebut diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam atau diskusi kelompok guna memberikan pandangan, pengalaman, dan perspektif mereka terhadap partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Melalui interaksi dengan subjek penelitian, peneliti memahami lebih dalam tentang berbagai aspek yang relevan dengan topik, termasuk motivasi, hambatan, persepsi, harapan, dan pengalaman yang mereka alami dalam pengelolaan dana desa. Informasi yang diperoleh dari subjek penelitian tersebut

kemudian akan digunakan untuk menganalisis dan memahami lebih lanjut fenomena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Subjek pada penelitian ini adalah orang yang menguasai informasi tentang masalah yang diteliti, unsur yang ada didalam Lingkungan instansi Kepala Desa, menduduki jabatan posisi penting didalam Lingkungan Masyarakat instansi Kepala Desa, dan dapat memberikan jawaban dengan baik. Maka dari itu, subjek penelitian ini yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kaur keuangan.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk kepada fenomena, situasi, atau hal yang menjadi fokus utama dari studi penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, objek penelitian adalah proses dan dinamika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di suatu desa atau beberapa desa yang diteliti.

Objek penelitian ini meliputi segala aspek terkait partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dana desa. Selain itu, objek penelitian juga mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, seperti strategi komunikasi kepala desa, transparansi pengelolaan dana desa, peran pemerintah desa, persepsi risiko masyarakat, dan lain sebagainya.

Objek penelitian ini dijelajahi secara mendalam melalui interaksi dengan subjek penelitian dan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk

memahami secara komprehensif bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat partisipasi, serta menggali strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Objek pada penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Dan Pengelolaan Dana Desa.

3.3 Informan

Informan dalam konteks penelitian merujuk kepada individu atau kelompok yang memberikan informasi, pandangan, atau wawasan tentang topik penelitian. Informan adalah sumber data utama yang memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, informan dapat berupa berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Informan ini memberikan wawasan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terjadi, tantangan yang dihadapi, pandangan terhadap strategi komunikasi kepala desa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Pengumpulan data dari berbagai informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen membantu peneliti dalam membangun gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Peneliti mengidentifikasi individu-individu yang dianggap memiliki potensi untuk memberikan kontribusi data yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi penelitian. Informan dalam penelitian ini merujuk kepada individu yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait objek yang sedang diteliti, dan oleh karena itu,

mereka diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive, di mana informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relevan untuk membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang tengah diteliti. Kelompok informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan anggota masyarakat di Kecamatan Barumon.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah proses mengelompokkan data atau informasi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri serupa. Tujuan dari kategorisasi adalah untuk mengatur dan mengelompokkan data sehingga lebih mudah dikelola, dipahami, dan dianalisis. Kategorisasi dapat membantu mengidentifikasi pola-pola, tren, atau variabel yang signifikan terkait dengan topik penelitian.

Tabel 3.1 Kategorisasi

No.	Kategorisasi	Indikator
1	Strategi Komunikasi Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenal Khalayak - Menyusun Pesan - Menetapkan Metode - Seleksi dan Penggunaan Media - Hambatan dalam Komunikasi
2	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Buah Pikiran - Partisipasi Tenaga

- Partisipasi Harta Benda
- Partisipasi Keterampilan
- Partisipasi Sosial
- 3 Pengelolaan Dana Desa
 - Perencanaan
 - Pelaksanaan
 - Penatausahaan
 - Pelaporan
 - Pertanggung Jawaban
- 4 Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa
 - Transparansi dan Akuntabilitas
 - Keterlibatan dalam Perencanaan
 - Kesadaran tentang Manfaat
 - Penguatan Keterampilan
 - Keterbukaan Kepala Desa
- 5 Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa
 - Kurangnya Informasi
 - Ketidakpercayaan terhadap pemerintah
 - Keterbatasan sumber daya
 - Perbedaan Pendapat dan konflik
 - Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab

Sumber: Peneliti (2023)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup berbagai teknik, termasuk wawancara, observasi, dan pengambilan dokumentasi sesuai kebutuhan yang relevan dalam konteks penelitian.

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara. Wawancara merupakan metode inti dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai sikap, pandangan, perilaku, dan peristiwa terkait dengan objek penelitian (Bungin, 2019).

Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengumpulkan informasi dari responden. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak struktur, peneliti gunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang pandangan, persepsi, atau pengalaman individu.

Penelitian ini mewawancarai Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kaur keuangan dan masyarakat. Dalam hal ini jenis wawancara dengan menggunakan wawancara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang men-*detail* dan lengkap. Metode wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yang juga dikenal dengan sebutan wawancara mendalam.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang terfokus pada kejadian, fenomena, atau objek tertentu. Metode pengamatan atau observasi ini melibatkan peneliti yang secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati aspek-aspek yang terkait dengan konteks ruang, waktu, lokasi, individu, aktivitas, objek, peristiwa, tujuan, dan emosi yang berkaitan dengan topik yang relevan dan penting untuk diamati (Emzir, 2012). Peneliti melakukan pengamatan terhadap penggunaan media Baliho yang di pasang di wilayah teritorial Desa. Media Baliho tersebut berisikan penggunaan dan pengelolaan dana Desa.

c. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Dokumentasi. Data yang diambil dari dokumen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang telah diatur dalam kebijakan yang disebut sebagai Peraturan Kepala Desa. Studi dokumen digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengambil beberapa foto yang terkait dengan kegiatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis data interaktif yang melibatkan empat tahapan penting, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Bungin, 2019).

1. Reduksi data

Reduksi data adalah tahap di mana peneliti memilih elemen-elemen yang paling signifikan, memfokuskan pada aspek yang dianggap paling penting dalam data yang diperoleh dari lapangan. Proses ini melibatkan pemilihan inti data dan penyingkiran elemen yang dianggap kurang relevan atau tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap penelitian. Dengan demikian, tahap reduksi data membantu dalam mengurangi volume data yang besar selama fase lapangan dan memastikan bahwa data yang diambil memiliki relevansi dan kegunaan yang optimal bagi penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data melibatkan berbagai format seperti grafik, tabel, kategori, atau penjelasan singkat. Proses penyajian data ini dapat dilakukan dengan memvisualisasikan data melalui berbagai bentuk representasi, menyajikan informasi dalam bentuk naratif teks, serta merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dari data tersebut.

3. Verifikasi atau Penarikan kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang melibatkan pembuatan kesimpulan awal yang bersifat sementara.

Kesimpulan ini dapat berubah apabila tidak ada data atau bukti konkret yang mendukungnya. Namun, jika kesimpulan awal ini dapat diperkuat dengan bukti yang solid dan dapat diverifikasi, maka kesimpulan tersebut akan diakui dan digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan akan memiliki kredibilitas, sehingga mampu menjawab pertanyaan atau permasalahan yang telah diajukan (Bungin, 2019).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Salah satu teknik untuk memastikan keabsahan data dalam berbagai penelitian adalah dengan menerapkan proses analisis triangulasi. Dalam metode ini, jawaban atau informasi yang diperoleh dari satu sumber dianalisis untuk memeriksa kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sumber data lain atau dari pengalaman empiris yang ada. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan informasi atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Dalam rangka menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan analisis triangulasi khususnya analisis triangulasi sumber. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda (Mulyana, 2013).

Peneliti menggunakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sumber data. Pemilihan BPD sebagai sumber data ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BPD dianggap sebagai sumber yang paling sesuai untuk melakukan triangulasi data. Alasannya adalah karena peran BPD yang signifikan dalam seluruh proses alokasi dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pembuatan, hingga pelaksanaan. BPD berfungsi sebagai pengawas lapangan setelah alokasi dana desa telah diterima

2	Kegiatan Penelitian																		
	a. Penelitian proposal																		
	b. Seminar proposal																		
	c. Izin penelitian																		
	d. Melakukan observasi, wawancara																		
3	e. Analisis hasil penelitian																		
	Kegiatan akhir																		
	a. Seminar hasil																		
	b. Penyusunan laporan akhir																		
	c. Sidang tesis																		

Sumber: Peneliti (2023)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara Kepala Desa berkomunikasi dalam mengelola Dana Desa di tiga desa di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Ketiga desa tersebut adalah Handis Julu, Pagaran Baringin, dan Sialambue. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang menggunakan berbagai metode pengumpulan data sebelumnya dijelaskan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan empat informan berbeda, yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Data-data yang terkumpul dari observasi dan dokumentasi kemudian akan dianalisis secara detail untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik ini.

Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh kepala desa memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan mengoptimalkan strategi ini, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat dipertahankan, dan hasil dari penggunaan dana desa dapat memiliki dampak positif yang lebih besar pada pembangunan desa secara menyeluruh.

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Barumun merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Kabupaten Padang Lawas

sendiri terletak di wilayah pesisir barat provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Barumon terletak di kabupaten Padang Lawas dengan luas daerah 126,10 Km². kecamatan Barumon memiliki 16 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Barumon memiliki jumlah penduduk 41.490 jiwa (BPS, 2022).

Kecamatan Barumon terletak antara 01°01'07"-01°05'23" LU dan 99°35'52" - 99°46'23" dengan luas wilayah 267.07Km² merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Kecamatan Barumon memiliki 16 Desa dan 1 Kelurahan. Kecamatan Barumon berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Lubuk Barumon dan Kecamatan Ulu Barumon; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sosa; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Barumon Selatan dan Kecamatan Sosa; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulu Barumon. Kecamatan Barumon termasuk dengan topografi Datar, bergelombang sampai berbukit.

Kecamatan Barumon memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Bagian tengah kecamatan cenderung datar dengan lahan pertanian yang subur, sementara di sekitarnya terdapat bukit-bukit dan lembah yang hijau. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti tanah subur yang cocok untuk pertanian, hutan-hutan tropis, serta sungai-sungai yang mengalir melalui kecamatan ini. Sumber daya alam ini berperan penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat Kecamatan Barumon umumnya merupakan masyarakat yang hidup dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kehidupan masyarakat di daerah ini masih kental

dengan budaya dan adat istiadat tradisional. Meskipun merupakan daerah rural, Kecamatan Barumon memiliki beberapa infrastruktur dasar seperti jalan raya, sekolah, klinik kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Namun, infrastruktur mungkin masih terbatas jika dibandingkan dengan kawasan perkotaan.



Gambar 4.1 Kantor Camat Barumon

Sumber: Peneliti (2023)

Masyarakat di Kecamatan Barumon mempertahankan kearifan lokal, seni tradisional, tarian, dan musik khas daerah tersebut. Kegiatan budaya dan tradisi masih dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat secara turun-temurun. Wilayah ini juga memiliki beragam lingkungan alami yang menarik, termasuk hutan-hutan yang memperkaya keragaman hayati dan keindahan alam. Namun, seperti halnya di banyak daerah lain, masalah lingkungan seperti deforestasi dan perubahan iklim juga menjadi perhatian. Kecamatan Barumon memiliki potensi wisata alam yang menarik, seperti air terjun,

danau, dan panorama perbukitan yang indah. Namun, potensi wisata ini mungkin belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

4.1.2 Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa salah satu bentuk strategi komunikasi yang diterapkan adalah komunikasi langsung. Kepala desa secara rutin mengadakan pertemuan dengan warga masyarakat yaitu musyawarah desa untuk menyampaikan informasi tentang rencana penggunaan dana desa, hasil-hasil program yang telah dilaksanakan, dan juga memperoleh masukan dari masyarakat. Pertemuan ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk bertanya, memberikan usulan, dan berdiskusi terkait dana desa. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Handis Julu Bapak Sukri Pohan pada tanggal 24 Juli 2023 dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Yang Pertama untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa Handis Julu ini contohnya berkomunikasi dengan baik sesama warga kemudian yang kedua tentunya kita berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat baik artinya eee di istilahkan di daerah kita ini si luluton atau Siriaon nah tentunya dari hal yang dua ini untuk membangun hubungan yang kuat di dalam antara kita sebagai kepala desa dengan warganya tentunya berkomunikasi yang baik dan juga selalu hadir di tengah tengah masyarakat kita ini.”

Selain itu, kepala desa juga menggunakan media sosial atau pesan berantai (*broadcast*) dari *Whatsapp* untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat kepada masyarakat. Di era teknologi informasi saat ini, media sosial menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang sekaligus. Penggunaan grup *WhatsApp* atau akun media sosial desa yaitu *Facebook* dapat menjadi cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan warga. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Handis Julu Bapak

Sukri Pohan pada tanggal 24 Juli 2023 dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Oiya disini di desa kita ini pak, walaupun agak kedalam, artinya dari dari jalan raya tentunya kita dari pemerintahan desa membuat akun Facebook. Nah dari akun media facebook ini kita posting apa apa saja program program yang kita buat atau pengumuman mungkin disitu di masyarakat kita tentunya lebih dari 40% udah menggunakan media sosial yang namanya akun facebook. nah kemudian tentunya pada saat ini kita belum mempunyai papan informasi. Tapi untuk mengantisipasi hal tersebut media ini, media papan informasi ini, ha ditempelkan a a pengumuman yang penting biar masyarakat mengetahui kita tempelkan di khalayak rame tentunya adanya kedai kopi. Ada berapa jumlah kedai kopi disini ha maka itu kita tempelkan karna itu tempat jumpulan masyarakat atau warga ha makanya dapat dilihat oleh warga pada saat disana”

Strategi komunikasi kepala desa memastikan bahwa bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan tidak terlalu teknis dalam menghadapi tantangan aksesibilitas dan tingkat literasi masyarakat. Penggunaan bahasa yang sederhana dan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dapat membantu mereka memahami informasi dengan lebih baik. Seperti dalam kutipan wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Baringin yaitu Bapak Humala Lubis sebagai berikut:

“Saya menyusun pesan yang jelas, terarah untuk masyarakat desa agar memahami kebutuhan mereka, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan juga menyampaikan informasi dengan singkat dan padat. Saya juga memastikan pesan saya selalu mengandung tujuan yang spesifik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.”

Strategi komunikasi kepala desa juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa atau rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penting untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari keputusan penggunaan dana

desa. Seperti dalam kutipan wawancara dengan BPD Desa Handis Julu Bapak Pada Mulia Hasibuan 24 Juli 2023 sebagai berikut:

“Ada pak, banyak masyarakat kita yang memberikan usulan dan ide mereka ya itu tadi untuk kemajuan desa kami bersama juga kan pak. Jadi masyarakat nya pada apa itu namanya pak gampang di andalkan lah kalau kita bilang pak”

Hasil Observasi di lapangan juga menunjukkan kepala desa mengupayakan agar komunikasi yang baik dengan masyarakat tidak hanya terjadi pada saat-saat tertentu, tetapi menjadi proses yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Hasil di lapangan juga menjelaskan dalam rangka meningkatkan efektivitas strategi komunikasi, kepala desa terus memantau dan mengevaluasi hasil dari setiap langkah komunikasi yang diambil. Menganalisis respon dan masukan dari masyarakat dapat membantu kepala desa untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat.

Kepala Desa menerapkan strategi komunikasi yang efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat desa dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana desa. Pertama-tama, Kepala Desa mengenal khalayak dengan baik, yaitu masyarakat desa, *stakeholder* lokal, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dana desa. Kepala Desa mendengarkan dengan cermat dan memahami kebutuhan, masalah, dan aspirasi mereka.

Setelah memahami khalayak, Kepala Desa menyusun pesan yang jelas dan mudah dipahami. Pesan tersebut mengkomunikasikan visi dan misi pengelolaan dana desa secara transparan. Pesan tersebut mencakup informasi tentang alokasi dana desa, rencana penggunaan dana, serta program dan proyek yang akan dijalankan untuk kesejahteraan warga desa.

Selanjutnya, Kepala Desa menetapkan metode komunikasi yang tepat. Metode berupa pertemuan langsung dengan masyarakat desa, rapat desa, penggunaan surat edaran, pengumuman di tempat-tempat umum, pemanfaatan teknologi informasi seperti website desa atau media sosial seperti *Whatsapp* dan *Facebook*. Pemilihan metode ini mempertimbangkan tingkat aksesibilitas dan preferensi komunikasi dari khalayak.

Kepala Desa juga memilih media yang paling sesuai yaitu, menggunakan media cetak untuk menyampaikan informasi ke masyarakat yang dari segi umur sudah lebih tua, sementara platform media sosial *Whatsapp* dan *Facebook* cocok untuk menjangkau generasi muda yang lebih terkoneksi dengan teknologi.

Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa merupakan pendekatan yang digunakan oleh kepala desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat desa tentang alokasi dan penggunaan dana desa. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas, transparan, dan efektif kepada masyarakat agar mereka dapat memahami rencana penggunaan dana desa, program-program yang akan

dijalankan, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait dana tersebut.

Strategi komunikasi ini melibatkan berbagai metode komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa. Pertemuan langsung dengan masyarakat diadakan secara rutin oleh kepala desa untuk menyampaikan informasi tentang alokasi dana desa dan kemajuan proyek-proyek yang sedang berjalan. Melalui pertemuan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, dan memberikan masukan kepada kepala desa. Seperti yang dikatakan dalam kutipan wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Baringin Bapak Humala Lubis sebagai berikut:

“Saya mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa dengan mengadakan rapat musyawarah desa, pertemuan rutin, dan sosialisasi secara berkala. Saya juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui buku saran atau media komunikasi lainnya. Selain itu, saya aktif mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat untuk mendorong partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait dana desa.”

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan juga menjadi bagian dari strategi komunikasi kepala desa. Dalam bentuk ceramah, diskusi kelompok, atau pelatihan, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan dana desa secara efisien dan partisipatif. Penggunaan media sosial, seperti *WhatsApp* dan *Facebook* juga dimanfaatkan oleh kepala desa untuk menyebarkan informasi tentang dana desa dan memperoleh masukan dari masyarakat. Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pagaran Baringin Bapak Aswar Evendi Hasibuan pada 26 Juli 2023 sebagai berikut:

“Ya, media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Media yang dipakai baliho, pengumuman di tempat umum, pertemuan langsung, atau media online kayak Whatsapp dan Facebook. sepertinya semua itu sudah cukup untuk diakses dan dimengerti warga”

Baliho dan materi promosi mencakup informasi tentang alokasi dana desa, proyek yang didanai, serta manfaatnya bagi masyarakat. Baliho ini dapat didistribusikan langsung kepada masyarakat atau ditempatkan di tempat umum agar informasi lebih mudah diakses. Selain berkomunikasi secara langsung, kepala desa juga dapat membentuk forum diskusi atau rapat musyawarah desa untuk mendiskusikan alokasi dana desa dan program prioritas. Masyarakat diundang untuk berpartisipasi dan memberikan masukan, sehingga pengambilan keputusan dapat melibatkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Kepala Desa Sialambue Bapak Akhiron Habibi pada 28 Juli 2023 sebagai berikut:

“Untuk memastikan media yang digunakan dapat diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat desa, sebagai kepala desa, saya menggunakan media yang sudah ada di desa, seperti pengeras suara, papan pengumuman, dan baliho....”

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga ditekankan dalam strategi komunikasi. Kepala desa secara terbuka menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana desa, hasil proyek, serta mekanisme pengawasan agar masyarakat dapat memahami dan memantau langsung penggunaan dana desa. Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Masyarakat Desa Sialambue Bapak Pamgadilan Nst pada 28 Juli 2023 sebagai berikut:

“Eee transparan pak kades sepertinya satu satunya faktor pendorong menurut saya pak”

4.1.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi, evaluasi dan umpan balik, dan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah. Partisipasi ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penggunaan dana tersebut untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat mencakup beberapa aspek penting:

1. Perencanaan

Partisipasi masyarakat dimulai dari tahap perencanaan. Warga desa berperan aktif dalam menyampaikan kebutuhan, aspirasi, serta prioritas pembangunan yang diinginkan. Musyawarah desa menjadi forum penting di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan terkait alokasi dana desa.

2. Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat juga merujuk pada kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana dan jenis proyek yang akan dijalankan. Partisipasi dapat mencakup mekanisme seperti penggunaan voting atau pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah desa.

3. Pelaksanaan

Warga desa berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan proyek yang menggunakan dana desa. Hal ini meliputi pemantauan pelaksanaan proyek, pemilihan kontraktor atau pelaksana, serta pengawasan terhadap kualitas dan keberhasilan proyek.

4. Pengawasan dan Transparansi

Partisipasi masyarakat melibatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Warga memiliki hak untuk memantau pengelolaan dana, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana, dan mendeteksi adanya penyimpangan atau praktik korupsi.

5. Evaluasi dan Umpan Balik

Masyarakat juga berperan dalam tahap evaluasi proyek dan program yang telah dilaksanakan. Mereka memberikan umpan balik tentang hasil proyek, dampaknya, serta saran untuk perbaikan di masa mendatang.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek, diharapkan mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan hak warga untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka di tingkat desa. Dengan partisipasi yang kuat, diharapkan Dana Desa dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memiliki manfaat yang signifikan, seperti:

a. Peningkatan Kualitas Pembangunan

Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, proyek yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Partisipasi masyarakat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa, mengurangi potensi penyalahgunaan atau korupsi.

c. Penguatan Kapasitas Masyarakat

Melalui partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, yang dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya lokal dan pembangunan.

d. Peningkatan Rasa Kepemilikan

Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa merasa memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan desa, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan mereka.

e. Peningkatan Inovasi

Partisipasi masyarakat dapat memunculkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif untuk permasalahan lokal yang dihadapi desa.

4.1.4 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Faktor pendorong dan faktor penghambat memiliki peran krusial dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Berikut Faktor pendorong dan faktor penghambat masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

a. Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Salah satu faktor pendorong adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pembangunan desa. Ketika masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan desa, mereka lebih cenderung untuk aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan dana desa juga menjadi faktor pendorong. Ketika pemerintah desa menjelaskan dengan jelas bagaimana dana desa digunakan dan mengundang

partisipasi masyarakat dalam pengawasan, masyarakat akan merasa lebih terlibat.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan program pembangunan dapat memotivasi mereka. Jika masyarakat memiliki suara dalam menentukan prioritas pembangunan desa, mereka akan merasa memiliki komitmen yang lebih kuat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana.

Kemampuan teknis juga menjadi faktor pendorong. Jika masyarakat memiliki keterampilan atau pengetahuan yang relevan dengan program yang sedang dilaksanakan, mereka akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk berkontribusi. Faktor pendorong partisipasi masyarakat yaitu :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi merujuk pada keterbukaan yang jelas tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan kebijakan. Transparansi berarti memberikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan mudah dipahami kepada masyarakat mengenai alokasi dana, program pembangunan yang dilaksanakan, sumber pendapatan, serta proses pengambilan keputusan. Transparansi memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang relevan untuk dapat mengawasi dan memahami apa yang sedang terjadi dalam pembangunan desa.

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam melaksanakan tugas dan keputusan dengan bertanggung jawab terhadap hasil dan dampak yang dihasilkan. Akuntabilitas berarti pemerintah desa dan pihak-pihak terkait memiliki kewajiban untuk menjelaskan bagaimana dana desa digunakan, sejauh mana program-program telah dilaksanakan, dan bagaimana hasil yang dicapai. Pemerintah desa juga harus siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada masyarakat, serta menghadapi pertanyaan atau kritik yang mungkin muncul.

Keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Ketika masyarakat memiliki akses informasi yang jelas tentang alokasi dan penggunaan dana, mereka merasa lebih percaya dan termotivasi untuk berpartisipasi.

Kedua konsep ini bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa percaya, terlibat, dan memiliki peran dalam pengelolaan dana desa. Transparansi memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi yang mereka butuhkan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa dan pihak terkait bertanggung jawab atas tindakan dan hasilnya.

2. Keterlibatan dalam Perencanaan

Keterlibatan dalam perencanaan adalah pendekatan yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan relevansi dalam suatu

proyek atau rencana pembangunan. Ini mencakup berbagai elemen masyarakat seperti warga lokal, pemimpin komunitas, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga non-pemerintah. Tujuan utama dari keterlibatan ini adalah untuk memastikan bahwa perencanaan berdasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang akan terpengaruh oleh rencana tersebut.

Keterlibatan dimulai dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proyek atau rencana tertentu. Melalui dialog terbuka, pertemuan, diskusi, dan serangkaian aktivitas partisipatif lainnya, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, pendapat, dan perspektif mereka. Ini dapat mencakup diskusi tentang prioritas pembangunan, kendala yang dihadapi, aspirasi jangka panjang, serta dampak yang diharapkan dari rencana tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan juga berfungsi untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil rencana. Dengan melibatkan warga dalam merancang solusi dan strategi, mereka merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Keterlibatan juga membantu meminimalkan risiko kelalaian atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Melalui dialog yang terbuka dan keterlibatan aktif, perencanaan dapat mencerminkan realitas dan kompleksitas masyarakat yang akan terpengaruh. Hasilnya adalah rencana yang lebih holistik, lebih berkelanjutan, dan lebih layak bagi masyarakat yang menjadi pusat perhatian rencana pembangunan. Keterlibatan dalam perencanaan juga merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi, mengakui bahwa keputusan yang mempengaruhi masyarakat harus melibatkan masyarakat itu sendiri.

Ketika masyarakat terlibat dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, mereka merasa memiliki tanggung jawab dan memiliki kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap pembangunan di desa mereka.

3. Kesadaran tentang Manfaat

Kesadaran tentang manfaat merujuk pada pemahaman individu atau kelompok masyarakat terhadap nilai positif yang dapat diperoleh dari suatu tindakan, kebijakan, atau program tertentu. Ini melibatkan pengenalan terhadap dampak positif yang mungkin timbul sebagai hasil dari partisipasi atau keterlibatan dalam suatu aktivitas. Kesadaran tentang manfaat adalah faktor penting dalam memotivasi orang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa atau pembangunan komunitas.

Kesadaran tentang manfaat berarti bahwa masyarakat desa memahami bagaimana dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi mereka. Ini bisa berarti memahami bahwa dana desa dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, atau fasilitas kesehatan. Kesadaran ini juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana dana tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal, pendidikan, kesejahteraan sosial, atau aspek-aspek lain yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kesadaran tentang manfaat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dana desa dan merencanakan pembangunan. Ketika masyarakat sadar bahwa partisipasi mereka dapat menghasilkan perubahan positif dalam lingkungan mereka, mereka cenderung lebih antusias dan terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek. Selain itu, kesadaran ini juga dapat membantu mengurangi resistensi atau ketidakpastian yang mungkin muncul saat memutuskan untuk terlibat.

Masyarakat yang menyadari manfaat dari program dan proyek yang didanai oleh dana desa cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Kesadaran ini dapat muncul melalui sosialisasi dan informasi yang disampaikan oleh kepala desa atau pihak terkait.

4. Penguatan Keterampilan

Penguatan keterampilan merujuk pada usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian individu atau kelompok dalam

melakukan suatu aktivitas atau tugas tertentu. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan pemahaman seseorang agar mereka menjadi lebih kompeten dalam menjalankan tugas atau menghadapi situasi tertentu.

Penguatan keterampilan dapat berarti memberikan pelatihan, pembinaan, atau pendidikan kepada anggota masyarakat desa yang terlibat dalam proses pengelolaan dana. Ini dapat mencakup berbagai aspek seperti administrasi keuangan, perencanaan proyek, pelaporan, pengawasan, dan komunikasi efektif. Penguatan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dana desa secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sering kali memerlukan keterampilan tertentu, seperti keterampilan perencanaan, pengawasan, dan pelaporan. Dengan memberdayakan masyarakat dan memberikan pelatihan, mereka dapat lebih aktif dan efektif dalam mengambil peran dalam proses pengelolaan dana desa.

5. Keterbukaan Kepala Desa

Keterbukaan kepala desa merujuk pada sikap dan tindakan kepala desa dalam berbagi informasi, pemahaman, dan penjelasan kepada masyarakat desa serta pihak-pihak terkait terkait berbagai aspek terkait desa, termasuk pengelolaan dana desa. Secara esensial, keterbukaan ini menciptakan lingkungan yang transparan dan terpercaya di antara kepala desa dan masyarakat.

Keterbukaan kepala desa mengandung beberapa elemen penting. Pertama, kepala desa harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pengelolaan dana desa. Hal ini mencakup alokasi dana, tujuan proyek, dan perkembangan proyek yang sedang berjalan. Kedua, keterbukaan juga mencakup komunikasi dua arah, di mana kepala desa mendengarkan masukan dan umpan balik dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Ini melibatkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran, dan memberikan saran terkait penggunaan dana desa.

Selain itu, keterbukaan kepala desa melibatkan penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti laporan keuangan desa, rencana pembangunan, dan perkembangan proyek. Informasi tersebut bisa disampaikan dalam bentuk rapat umum, papan pengumuman, atau media sosial desa.

Keterbukaan kepala desa memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan antara kepala desa dan masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jujur dan transparan, kepala desa membuka ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengelolaan dana desa. Keterbukaan ini juga membantu mencegah terjadinya ketidakjelasan, spekulasi, dan ketidakpercayaan yang dapat menghambat partisipasi dan dampak positif dari pengelolaan dana desa.

Secara keseluruhan, keterbukaan kepala desa merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan saling percaya antara kepala desa dan masyarakat, serta memastikan partisipasi yang lebih baik dan pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan berhasil.

Sikap terbuka dan inklusif dari kepala desa terhadap partisipasi masyarakat akan mendorong masyarakat untuk lebih berani dan aktif memberikan kontribusi serta berkomunikasi dalam pengelolaan dana desa.

b. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Kurangnya Informasi

Kurangnya informasi mengacu pada keadaan di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses atau pemahaman yang memadai terhadap informasi yang relevan terkait suatu masalah atau situasi tertentu. Ini bisa menjadi hambatan serius dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Komunikasi yang tidak efektif antara kepala desa dan masyarakat dapat menjadi faktor penghambat partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Jika informasi yang disampaikan tidak jelas, tidak tepat sasaran, atau kurang terbuka, masyarakat mungkin merasa bingung atau kurang termotivasi untuk berpartisipasi. Jika kepala desa tidak dapat menjelaskan dengan jelas tujuan dan manfaat dari pengelolaan dana desa kepada masyarakat, maka masyarakat mungkin tidak melihat alasan kuat untuk

berpartisipasi. Kepala desa perlu mampu mengkomunikasikan bagaimana partisipasi mereka akan berdampak positif pada pembangunan desa. Beberapa masyarakat mungkin kurang memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa karena merasa bahwa itu adalah tanggung jawab pemerintah semata. Kepala desa perlu menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan desa. Terkadang, prioritas masyarakat terhadap kebutuhan dan program pembangunan dapat berbeda dengan apa yang dianggap penting oleh kepala desa. Perbedaan ini dapat menghambat partisipasi karena masyarakat mungkin merasa bahwa kontribusi mereka tidak akan dihargai. Masyarakat mungkin menghindari partisipasi karena takut terlibat dalam konflik atau perpecahan dengan tetangga atau kelompok lain di desa. Kepala desa perlu memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak akan membawa dampak negatif pada hubungan antarwarga. Jika masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan diakui atau dihargai, mereka mungkin kurang termotivasi untuk berpartisipasi. Kepala desa perlu menciptakan insentif, baik dalam bentuk apresiasi formal maupun non-formal, untuk mendorong partisipasi aktif. Ketidaktahuan atau minimnya informasi tentang dana desa, program, dan proyek yang sedang berjalan dapat menghambat partisipasi masyarakat. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat sulit untuk ikut serta dan memberikan kontribusi.

2. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah adalah suatu kondisi di mana masyarakat merasa ragu atau tidak yakin terhadap niat, integritas, dan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ketidakpercayaan semacam ini dapat muncul sebagai hasil dari berbagai faktor dan memiliki dampak yang signifikan pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Masyarakat yang memiliki pengalaman buruk dengan pemerintah desa atau kepala desa sebelumnya, atau yang merasa bahwa tindakan pemerintah tidak sesuai dengan harapan mereka, cenderung merasa tidak percaya terhadap pemerintah. Ketidaktransparan dalam pengelolaan dana desa, misalnya, dapat memberikan kesan bahwa ada yang disembunyikan atau bahwa pengelolaan dana tidak dilakukan secara adil dan akuntabel.

Ketidakpercayaan ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat yang tidak percaya mungkin enggan untuk berkontribusi atau memberikan masukan, karena mereka merasa bahwa usaha mereka tidak akan dihargai atau bahwa hasilnya tidak akan positif. Akibatnya, partisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa dapat berkurang.

Untuk mengatasi ketidakpercayaan ini, kepala desa perlu membangun keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Melalui penyediaan informasi yang jelas, komunikasi terbuka,

dan demonstrasi integritas dalam tindakan, kepala desa dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Menunjukkan komitmen untuk menjalankan tugas dengan baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat dapat membantu mengatasi hambatan ketidakpercayaan ini. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah adalah kondisi di mana masyarakat merasa ragu atau tidak yakin terhadap niat, integritas, dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ketidakpercayaan semacam ini bisa timbul dari sejumlah faktor dan memiliki dampak yang signifikan pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Jika masyarakat merasa tidak percaya terhadap pemerintah desa atau kepala desa karena pengalaman buruk atau ketidaktransparan, mereka cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya mengacu pada situasi di mana desa atau masyarakat menghadapi keterbatasan dalam hal aset, dana, personel, atau infrastruktur yang dapat digunakan untuk mengelola dana desa dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Keterbatasan ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Beberapa masyarakat desa mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya seperti akses terbatas ke pendidikan, informasi, dan teknologi. Hal

ini dapat menghambat partisipasi aktif karena keterbatasan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi.

Keterbatasan sumber daya merujuk pada situasi di mana masyarakat desa menghadapi keterbatasan dalam hal waktu, tenaga, keahlian, dan sumber daya finansial yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Faktor-faktor ini dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi partisipasi yang aktif dan berkelanjutan.

Masyarakat desa seringkali memiliki tugas dan pekerjaan harian yang mengikat, seperti pekerjaan di ladang atau mengurus keluarga. Keterbatasan waktu ini dapat menghambat keterlibatan mereka dalam pertemuan atau kegiatan terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, masyarakat juga mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan khusus yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan atau pelaporan.

Keterbatasan sumber daya finansial juga dapat mempengaruhi partisipasi. Jika berpartisipasi memerlukan biaya tambahan, seperti biaya transportasi untuk menghadiri pertemuan, masyarakat yang ekonominya sempit mungkin enggan untuk berpartisipasi. Selain itu, masyarakat mungkin menganggap bahwa manfaat yang mereka terima dari partisipasi tidak sebanding dengan waktu dan usaha yang harus mereka keluarkan.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, kepala desa perlu mempertimbangkan fleksibilitas dalam waktu dan lokasi pertemuan.

Mereka juga dapat menyediakan pelatihan atau pendampingan untuk membantu masyarakat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, kepala desa dapat mencari cara untuk mengurangi biaya atau memberikan insentif bagi partisipasi aktif, seperti memberikan dukungan transportasi atau kompensasi kecil.

4. Perbedaan Pendapat dan Konflik

Perbedaan pendapat mengacu pada variasi dalam pandangan, opini, atau sudut pandang antara individu atau kelompok. Ini adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan persepsi yang berbeda. Perbedaan pendapat tidak selalu menyebabkan konflik, karena dapat dihadapi dengan saling menghargai pandangan orang lain dan berdiskusi secara terbuka. Dalam banyak kasus, perbedaan pendapat bahkan dapat menjadi sumber ide baru, kreativitas, dan pemikiran yang mendalam.

Konflik adalah situasi di mana perbedaan pendapat atau kepentingan mengarah pada ketegangan, pertentangan, atau pertikaian yang lebih serius. Konflik melibatkan ketidaksetujuan yang kuat dan mungkin mencakup emosi yang intens. Konflik bisa bersifat verbal atau non-verbal, individu-ke-individu atau kelompok-ke-kelompok. Konflik dapat timbul dalam berbagai konteks, termasuk hubungan pribadi, keluarga, organisasi, dan masyarakat. Pada tingkat yang lebih serius, konflik dapat mengganggu harmoni, menghambat kerjasama, dan bahkan mengarah pada tindakan yang merugikan.

Perbedaan penting antara perbedaan pendapat dan konflik adalah tingkat intensitas dan dampaknya. Perbedaan pendapat umumnya dapat diatasi melalui komunikasi terbuka, saling mendengarkan, dan saling menghargai. Di sisi lain, konflik mungkin memerlukan penanganan yang lebih cermat, seperti negosiasi, mediasi, atau upaya untuk mencari solusi bersama.

Perbedaan pendapat dan konflik antara masyarakat atau dengan pemerintah desa bisa menjadi hambatan bagi partisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa. Konflik internal atau antarwarga dapat mengurangi motivasi untuk berkolaborasi dalam pembangunan desa.

5. Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab

Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau lingkungan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas, kewajiban, atau peran yang mereka harus jalankan. Ini dapat mencakup ketidakpastian mengenai apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana mereka berkontribusi, dan bagaimana mereka harus berinteraksi dengan orang lain. Jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dana desa, partisipasi mereka dapat menjadi kurang efektif atau bahkan pasif.

Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab mengacu pada situasi di mana individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau lingkungan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas, kewajiban, atau

peran yang harus mereka laksanakan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, hal ini dapat berarti bahwa masyarakat tidak sepenuhnya memahami kontribusi yang diharapkan dari mereka atau bagaimana mereka seharusnya berpartisipasi dalam proses tersebut.

Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai bagaimana masyarakat harus berkontribusi atau berinteraksi dalam pengelolaan dana desa. Ini dapat mengakibatkan partisipasi yang kurang efektif atau bahkan pasif. Masyarakat mungkin ragu-ragu dalam mengambil tindakan karena mereka tidak yakin tentang apa yang diharapkan dari mereka atau khawatir melakukan kesalahan.

Oleh karena itu, kepala desa perlu memastikan bahwa peran dan tanggung jawab setiap anggota masyarakat dalam pengelolaan dana desa sudah jelas dan dipahami oleh semua pihak. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, atau pertemuan komunitas di mana peran masing-masing individu atau kelompok dijelaskan secara rinci. Memastikan bahwa setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif akan membantu meningkatkan partisipasi dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa.

4.2 Pembahasan

Strategi lain yang dapat digunakan oleh kepala desa adalah penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Penghargaan dapat diberikan kepada masyarakat yang

aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kontribusi mereka. Di sisi lain, sanksi dapat digunakan untuk menanggulangi perilaku yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, kepala desa juga harus mempertimbangkan persepsi risiko masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Jika masyarakat merasa bahwa inovasi ini membawa risiko yang tinggi atau tidak dapat dikelola dengan baik, mereka mungkin enggan untuk mengadopsinya. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa dapat membantu mengurangi ketakutan masyarakat terhadap risiko dan meningkatkan partisipasi mereka.

Dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait dana desa, kepala desa dapat meningkatkan adopsi inovasi pengelolaan dana desa secara luas dan berkelanjutan di masyarakat desa.

Metode komunikasi yang digunakan juga mencakup berbagai pendekatan, seperti pertemuan langsung dengan masyarakat, sosialisasi, penyuluhan, dan pemanfaatan media sosial. Pertemuan langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan kepala desa, bertanya, dan memberikan masukan terkait alokasi dana desa dan kemajuan proyek-proyek yang sedang berjalan. Sosialisasi dan penyuluhan menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dana desa secara efisien dan partisipatif.

Pemanfaatan media sosial, seperti *WhatsApp* dan *Facebook*, juga menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya media sosial, informasi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, dan mereka juga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan secara online. Selain itu, baliho dan materi promosi juga menjadi sarana dalam menyampaikan informasi tentang alokasi dana desa, proyek yang didanai, dan manfaatnya bagi masyarakat. Baliho ini dapat didistribusikan langsung kepada masyarakat atau ditempatkan di tempat umum agar informasi lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Menghadapi faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, ditemukan bahwa faktor pendorong, seperti transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, kesadaran tentang manfaat, penguatan keterampilan, dan sikap terbuka kepala desa, sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat, ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa, keterbatasan sumber daya, perbedaan pendapat dan konflik, serta ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, penting bagi kepala desa dan pemerintah desa untuk lebih fokus pada transparansi, penyediaan informasi yang cukup dan jelas, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dana desa. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan, dan

pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Strategi komunikasi yang diimplementasikan oleh kepala desa dalam menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memiliki berbagai dimensi yang penting. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah menggunakan sistem penghargaan dan sanksi. Penghargaan dapat menjadi insentif bagi masyarakat yang aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa. Ini dapat berupa pengakuan publik, sertifikat penghargaan, atau penghargaan non-materi lainnya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Dengan memberikan penghargaan, kepala desa memberikan sinyal positif bahwa partisipasi aktif dihargai dan diakui oleh pemerintah desa.

Sementara itu, sanksi dapat digunakan untuk mengatasi perilaku yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Sanksi ini harus diterapkan dengan bijaksana dan adil, dengan tujuan untuk mengubah perilaku yang tidak sesuai dan tidak produktif. Contohnya, jika ada individu atau kelompok yang enggan berpartisipasi atau bahkan menghalangi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, tindakan sanksi dapat diambil sebagai upaya untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan inklusif.

Kepala desa juga perlu memahami dan mengatasi persepsi risiko masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Jika masyarakat merasa bahwa pengelolaan dana desa membawa risiko yang tinggi atau tidak transparan, mereka cenderung enggan terlibat. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan transparansi dalam proses

pengelolaan dana desa akan membantu mengurangi ketakutan masyarakat terhadap risiko dan membangun kepercayaan.

Strategi komunikasi yang berfokus pada pertemuan langsung, sosialisasi, penyuluhan, dan media sosial dapat memberikan dampak yang positif. Pertemuan langsung antara kepala desa dan masyarakat memberikan kesempatan untuk menjalin interaksi yang lebih pribadi dan mendalam. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bertanya, memberikan masukan, dan merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa.

Sosialisasi dan penyuluhan dapat menjadi alat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pengelolaan dana desa yang efektif. Di sisi lain, pemanfaatan media sosial seperti *WhatsApp* dan *Facebook* membuka jalur komunikasi yang lebih cepat dan luas. Informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan atau pertanyaan secara online.

Penting juga untuk memperhatikan penyebaran informasi melalui media fisik, seperti baliho dan materi promosi. Dengan cara ini, informasi tentang alokasi dana desa, proyek yang didanai, dan manfaatnya dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Penempatan baliho dan materi promosi di tempat umum akan memastikan bahwa informasi tersebut tersampaikan dengan baik.

Menghadapi faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, penting untuk membangun strategi komunikasi yang mencakup semua dimensi ini. Kepala desa dapat menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi dengan menerapkan insentif dan sanksi yang tepat. Mereka

juga harus memastikan bahwa komunikasi terbuka, edukasi, dan akses informasi yang cukup tersedia bagi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan, dan desa dapat mencapai pembangunan yang lebih efektif dan sesuai dengan aspirasi warganya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Strategi Komunikasi Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi Kepala Desa menerapkan pemahaman yang baik tentang khalayak, penyusunan pesan yang jelas, pemilihan metode komunikasi yang tepat, dan pemanfaatan media yang sesuai. Pertemuan langsung, kegiatan sosialisasi, dan pemanfaatan media sosial menjadi bagian penting dari strategi komunikasi ini.
2. Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan dalam perencanaan, kesadaran tentang manfaat, penguatan keterampilan dan keterbukaan kepala desa. sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya informasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, perbedaan pendapat dan konflik, keterbatasan sumber daya dan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab.

5.2 Saran

1. Secara teoritis, Perlu peninjauan teori-teori strategi komunikasi untuk memahami bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan diproses dalam konteks kepemimpinan desa. Teori ini akan membantu Anda menganalisis efektivitas strategi komunikasi kepala desa.

2. Secara akademis, Pertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang unik untuk daerah tersebut. Konteks lokal akan mempengaruhi strategi komunikasi dan partisipasi masyarakat.
3. Secara praktis, Perlu program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Ini bisa berupa pelatihan, lokakarya, atau forum diskusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. G. R. S. A. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran iNews TV Sumut dalam Meningkatkan Segmentasi Pemirsa. *Communication Journal*, 4(1), 10. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v>
- BPS Padang Lawas. (2022). *Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka*.
- Bungin, B. (2019). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Cangara, H. (2014). *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiningrum, S. I. A. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Effendy, O. U. (2015). *Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Citra Aditia Bakti.
- Emzir, M. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif "Analisis Data."* Jakarta: Rajawali Pers.
- Firmansyah, A. (2018). *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*. Deepublish.
- Heris. (2016). *Ilmu Komunikasi Proses dan Strategi*. Tangerang: Indigo Media.
- Jonnedi, & Ginting, R & Hendra, Y. (2020). Strategi Komunikasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal. *Jurnal Simbolika*, 6(April), 76–85.
- Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Mulyana, D. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novrianus Bunga. (2020). *Analisis Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan ADD Demi Mewujudkan Pembangunan Partisipatif*. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><https://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Pangemanan F., L., Pio R., J., Tumbel T., M. (2017). Pengaruh Work-life Balance dan Burnout terhadap Kepuasan kerja. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2022. (2022). Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(12), 7250–7257. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

- PP Nomor 8 Tahun 2016. (2016). Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Pemerintah RI*, 1–12.
- Priansa, D. J. (2017). *Komunikasi Pemasaran Terpadu*. CV Pustaka Setia.
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203–1212.
- Putri, A. P. W., & Nasdian, F. T. (2021). Hubungan Antara Tingkat Partisipasi Masyarakat Dengan Kemanfaatan Program CSR PT Holcim Indonesia TBK (Kasus: Program Sampireun, di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *JSKPM: Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 5(6), 908–924. <http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/view/925>
- Simamora, R. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan*.
- Siregar, A. B., -, R., & Ginting, R. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Elektabilitas Pada Pilkada 2020 Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 280. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.280-287>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suryadi, E. (2018). *Strategi Komunikasi Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global*. Remaja Rosdakarya.
- DESA, 18-April-2 45 (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Z. Y Abidin. (2015). *Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. CV Pustaka Setia.

Lampiran 1

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN KEPALA DESA:

1. Bagaimana Anda membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa?
2. Bagaimana Anda menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa?
3. Bagaimana Anda memastikan pesan yang disampaikan dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana Anda memastikan media yang digunakan dapat diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat desa?
5. Apa hambatan umum yang Anda hadapi dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa, dan bagaimana Anda mengatasinya?
6. Bagaimana Anda mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?
7. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?
8. Apa upaya yang Anda lakukan untuk melibatkan masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?
9. Bagaimana Anda mendorong masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?
10. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang Anda adakan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antar warga desa dalam pengelolaan dana desa?
11. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
12. Bagaimana Anda memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan perencanaan?

13. Bagaimana Anda mengelola administrasi dan dokumentasi terkait dengan pengelolaan dana desa?
14. Bagaimana Anda menyusun laporan berkala tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pihak terkait?
15. Bagaimana Anda memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat desa?
16. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?
17. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

DAFTAR PERTANYAAN BPD, KAUR KEUANGAN DAN MASYARAKAT :

1. Bagaimana Kepala Desa membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana Kepala Desa memastikan pesan yang disampaikan dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana Kepala Desa memastikan media yang digunakan dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa?
5. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?
6. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?
7. Adakah partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?
8. Adakah partisipasi masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?
9. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang diadakan kepala desa yang diikuti masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

10. Adakah partisipasi masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?
11. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?
12. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

I. KEPALA DESA HANDIS JULU

Nama : **SUKRI POHAN**

Tanggal : **24 JULI 2023**

Pukul : **11.00 WIB**

Jabatan : **KEPALA DESA HANDIS JULU**

1. Bagaimana Anda membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa?

Jawaban:

“Yang Pertama untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa Handis Julu ini contohnya berkomunikasi dengan baik sesama warga kemudian yang kedua tentunya kita berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat baik artinya eee di istilahkan di daerah kita ini si luluton atau Siriaon nah tentunya dari hal yang dua ini untuk membangun hubungan yang kuat di dalam antara kita sebagai kepala desa dengan warganya tentunya berkomunikasi yang baik dan juga selalu hadir di tengah tengah masyarakat kita ini.”

2. Bagaimana Anda menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa?

Jawaban:

“Baik, eeee Untuk menyusun pesan tentunya melalui menyusun pesan yang jelas terarah dan relevan bagi masyarakat gitu menentukan tujuan informasi tentunya apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang program ini pemerintahan desa membuat menjadi sebuah pengumuman penting atau kebijakan baru yang ingin disampaikan memastikan tujuan komunikasi secara spesifik terhubung sehingga bisa disampaikan lebih fokus dan juga terarah.”

3. Bagaimana Anda memastikan pesan yang disampaikan dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Itu mungkin Pesan yang disampaikan kalau biar termotivasi mereka kan pak supaya motivasi tentunya disampaikan tujuan jika itu dia pembangunan fisik kita Contohkan lah pak untuk jalan setapak tentunya supaya termotivasi tentunya kita sampaikan misalkan jalan setapak menuju pertanian bagaimana biar barang apa ee suatu panen suatu bahan biar lebih mudah untuk transportasinya distribusikannya distribusikan ke rumah atau ke.. ke.. apa namanya suatu perusahaan.”

4. Bagaimana Anda memastikan media yang digunakan dapat diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat desa?

“Oiya disini di desa kita ini pak, walaupun agak kedalam, artinya dari dari jalan raya tentunya kita dari pemerintahan desa membuat akun Facebook. Nah dari akun media facebook ini kita posting apa apa saja program program yang kita buat atau pengumuman mungkin disitu di masyarakat kita tentunya lebih dari 40% udah menggunakan media sosial yang namanya akun facebook. nah kemudian tentunya pada saat ini kita belum mempunyai papan informasi. Tapi untuk mengantisipasi hal tersebut media ini, media papan informasi ini, ha ditempelkan a a pengumuman yang penting biar masyarakat mengetahui kita tempelkan di khalayak rame tentunya adanya kedai kopi. Ada berapa jumlah kedai kopi disini ha maka itu kita tempelkan karna itu tempat jumpulan masyarakat atau warga ha makanya dapat dilihat oleh warga pada saat disana.”

5. Apa hambatan umum yang Anda hadapi dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Jawaban:

“Ha tentunya kalau hambatan inkan mungkin rasanya ada sih pak, namun, eee kembali kagikan lah yakan bagaimana hambatan ini supaya langsung kita komunikasikan kepada masyarakat kayak yang sudah saya sampaikan tadi pak,

kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Apa apa saja kegiatan baik itu si luluton siriaon eee terkadang masyarakat desa dapat memiliki ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa namun ketidakpercayaan masyarakat ada solusi kita buat kan pendekatan -pendekatan terhadap masyarakat kita.”

6. Bagaimana Anda mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Eee mengenai hal itu pak, tentunya menyampaikan ini kita buat musyawarah desa. Disanala kita membuang apa apa saja yang disampaikan ide masyarakat juga sesama kita di pemerintahan desa juga disampaikan adanya perkumpulan musyawarah sepertinya itu jalan terbaik”

7. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Eee jadi kalau keterlibatan masyarakat tentang adanya anggaran yang kita buat baik itu anggaran fisik, kita sampaikan eee kepada seluruh masyarakat baik itu secara pengumuman atau diajak dipanggil ke kantor desa, kemudian ini kita libatkan seluruh warga tentunya inspektorat yang ada waktunya contoh jalan setapak atau plat tegel ha ini mungkin di kavling ini pak, ya kita usulkan, kita membangun jalan setapak 60m dan ada juga plat tegel menuju jalan mesjid, intinya mereka dilibatkan untuk suatu proses pembangunan mesjid”.

8. Apa upaya yang Anda lakukan untuk melibatkan masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Jadi rasanya kalau untuk melibatkan masyarakat supaya jalan yang dianggarkan di dana desa itu tentunya jika berpandang dari kaca mata kita di desa ini tentunya

kita sangat kurang artinya untuk eee membantu suatu kegiatan fisik kita tergantung ekonomi kita menengah kebawah”

9. Bagaimana Anda mendorong masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“Ya sampai saat ini pak, taulah pak masih dalam waktu 6 bulan masih belajar tentunya masih eee tahap belajar dalam artian masih mendata. Tentunya ini masih terus kita dorong apalagi saat ini program yang di alokasikan dari dana desa tidak di prioritaskan lagi hanya pada infrastruktur tetapi sudah mengarah ke arah sumber daya manusia”.

10. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang Anda adakan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antar warga desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, saya mengadakan beberapa kegiatan atau acara sosial untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antar warga desa dalam pengelolaan dana desa. Kayak gotong royong, festival budaya lokal, bakti sosial, dan kemarin sempat juga ada pelatihan”

11. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Sangat jelas juga tentunya. Saya menyelenggarakan musyawarah desa secara rutin, Selain musyawarah desa, saya juga mengadakan forum diskusi khusus dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, ibu-ibu PKK, atau Karang Taruna, Saya juga mengadakan konsultasi publik terbuka dengan masyarakat untuk membahas rencana perencanaan pengelolaan dana desa.”

12. Bagaimana Anda memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan perencanaan?

Jawaban:

“Saya secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana desa dan Saya mewajibkan semua pihak terlibat dalam pengelolaan dana desa untuk menyampaikan laporan secara berkala mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.”

13. Bagaimana Anda mengelola administrasi dan dokumentasi terkait dengan pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Saya memanfaatkan teknologi dengan menggunakan sistem komputerisasi untuk pengelolaan administrasi dan dokumentasi. Penggunaan perangkat lunak akuntansi atau aplikasi pengelolaan keuangan membantu mempermudah pencatatan dan pengelolaan data. Dokumen-dokumen tersebut mencakup rencana anggaran, laporan keuangan, faktur, kwitansi, kontrak dengan pihak ketiga. Selain itu, kami juga mengundang pihak eksternal, seperti auditor independen atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk melakukan audit eksternal dan memberikan pandangan independen tentang pengelolaan dana desa.”

14. Bagaimana Anda menyusun laporan berkala tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pihak terkait?

Jawaban:

“Saya menyusun laporan keuangan secara rutin, misalnya bulanan atau triwulanan, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan desa dan perkembangan pengelolaan dana desa kepada pihak-pihak terkait. Laporan mencakup informasi yang relevan, termasuk alokasi dana desa, kemajuan pelaksanaan proyek dan kegiatan, realisasi anggaran, dan evaluasi pencapaian tujuan. Saya menyampaikan laporan kepada masyarakat melalui mekanisme partisipatif, seperti musyawarah desa, forum kelompok masyarakat, atau pertemuan terbuka. Selain itu, laporan juga disampaikan kepada pihak

terkait lainnya, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), instansi pemerintah kabupaten, atau lembaga pemeriksa eksternal.”

15. Bagaimana Anda memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat desa?

Jawaban:

“Saya menyusun laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa dan menyampaikannya kepada masyarakat secara terbuka. Laporan ini mencakup informasi mengenai penggunaan dana, realisasi anggaran, proyek yang telah selesai, dan perkembangan proyek yang sedang berjalan. Dan Saya melibatkan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa melalui forum musyawarah desa. Pada forum ini, saya menyampaikan laporan tentang penggunaan dana desa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, usulan, dan tanggapan terhadap pelaksanaan proyek.”

16. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Ketika saya dan pemerintah desa menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dana desa, masyarakat merasa lebih yakin dan percaya. Selain itu, Keterlibatan dalam Perencanaan, Kesadaran tentang Manfaat, Penguatan Keterampilan, Keterbukaan Kepala Desa, Dukungan dan Fasilitasi, dan Kesadaran akan Tanggung Jawab Bersama”

17. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Ketidaktahuan informasi tentang dana desa, program, dan proyek yang sedang berjalan, masyarakat gak percaya sama pemerintah, beda pendapat antara

masyarakat dengan pemerintah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur tanggung jawab dana desa, dukungan dan fasilitasi yang tidak memadai.”

II. KAUR KEUANGAN DESA HANDIS JULU

Nama : **ABD. KARIM NASUTION**

Tanggal : **24 JULI 2023**

Pukul : **14.00 WIB**

Jabatan : **KAUR KEUANGAN DESA HANDIS JULU**

1. Bagaimana Kepala Desa membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Komunikasi kepala desa aktif dan transparan, komunikasinya sering sama pemerintah desa ataupun masyarakat, gitu kan membangun kepercayaan dengan konsisten terhadap apa yang dikatakan”

2. Apakah Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Pesan yang disampaikan oleh Kepala Desa akan menggunakan bahasa yang sederhana lah dan mudah dipahami oleh itu seluruh lapisan masyarakat desa”

3. Apakah pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Kepala Desa memberikan informasi tentang proyek pembangunan yang akan dilakukan, manfaat yang akan diperoleh, dan dampak positif bagi masyarakat.”

4. Apakah media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa?

Jawaban:

“Ya, 90% dapat diakses masyarakat. Dikarenakan peletakan informasi benar-bener ditempat perkumpulan warga yaitu di kede kopi dan juga di media sosial *Facebook*”

5. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Masyarakat sangat berpartisipasi dalam ngasi usulan mereka dan penilaian saya mereka aktif pada saat pak kades membuat musdes untuk pengelolaan dana desa itu”

6. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan pembangunna kayak kemarin itukan pak masyarakat dilibatkan dalam pembangunan mesjid”

7. Adakah partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Kalau untuk partisipasi yang ini kan pak belum ada saya liat sih, karna masyarakat kita ini juga dari keluarga yang kurang mampu hampir rata semuanya”

8. Adakah partisipasi masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“saat ini juga belum ada pak”

9. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang diadakan kepala desa yang diikuti masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ohh gotong royong, bakti sosial kek gitu kan pak? Itu lah pak ada gotong royong, festival budaya itu pak”

10. Adakah partisipasi masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ada pak, masyarakat dapat mengusulkan ide mereka, masyarakat mengerjakan proyek fisik, mengelola program sosial, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara langsung, mengawasi penggunaan dana dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, Masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang penggunaan dana desa dan kemajuan proyek atau kegiatan yang sedang berlangsung dan memastikan kualitas pelaksanaan proyek sesuai dengan standar yang diharapkan.”

11. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Laporan dana desa yang transparan, keterlibatan masyarakat, Masyarakat yang menyadari manfaat dari program dan proyek yang didanai oleh dana desa, keterbukaan kades, lingkungan yang mendukung, Melibatkan lembaga desa dan mengakui dan menghargai kontribusi yang diberikan oleh masyarakat”

12. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Warga gak percaya sama pemdes kadang pak, dah gitu mau kadang beda persepsi dan pendapat”

III. MASYARAKAT DESA HANDIS JULU

Nama : **MHD. SHOLEH HASIBUAN**
Tanggal : **24 JULI 2023**
Pukul : **16.00 WIB**
Jabatan : **MASYARAKAT DESA HANDIS JULU**

1. Bagaimana Kepala Desa membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ohh oke pak baik, Bapak Kepala Desa ini seperti si lulutton dan sisiraon dia, pas kemalangan hadir, pas pesta hadir selalu ada ditengah-tengah kami ini pak. Begitu pak jadi emang membangun hubungan yang kuat”

2. Apakah Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Jadi bapak kepala desa sengaja mengundang tokoh – tokoh masyarakat dari situlah bapak kepala desa menyampaikan apa – apa yang perlu diberikan tau kepada masyarakat. Jadi nantikan tokoh-tokoh ini diharapkan jadi perpanjangan kepala desa kepada masyarakat pak gitu”

3. Apakah pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Lumayan lah pak, karna bapak kepala desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dana desa akan memberikan rasa memiliki dan kesempatan untuk berkontribusi.”

4. Apakah media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa?

Jawaban:

“Media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa tidak selalu dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa secara keseluruhan seperti saya ini, tidak main facebook jadi hanya bisa liat dari pengumuman yang di tempelkan di kede kopi pak. Berarti kan saya harus ke kede kopi dulu baru bisa dapat info. Tapi kalau yang masih muda muda ini pasti saya rasa dapat diakses terus semuanya.”

5. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan ide saran Eee pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam ngasih saran itu penting dalam pengelolaan dana di des aini pak”

6. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Kalau kami disini pak, aktif aktif semua. Kalau di undang bapak kades pasti kami datang. Kami pun senang dan bangga karna dilibatkan dalam urusan desa apalagi pembangunan desa kami sendiri kan pak”

7. Adakah partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Nangadong pak. Makan aja kita kadang pas-pasan kan. Jadi tenaga aja lah yang bisa kami sumbangkan”

8. Adakah partisipasi masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“Menurut saya, tokoh-tokoh masyarakat, adat yang ada di desa ini sudah cukup banyak berpartisipasi dalam mencurahkan kan ide. Ide itu kan bisa termasuk pengetahuan kan pak.”

9. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang diadakan kepala desa yang diikuti masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Paling gotong royong kami pak, sama pernah sekali itu kami bakti sosial. Itupun udah bagus saya rasa”

10. Adakah partisipasi masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Alhamdulillah, bapak kades kami ini selalu melibatkan kami dalam program apa aja yang lagi dikerjakan orang desa pak. Jadi kami semua sebagai masyarakat siap siap aja”

11. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Eeee sepertinya karna bapak kades kami ini sangat terbuka dan transparan ya pak”

12. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Faktor penghambat ya ee apa yaa.. ooo ada juga pak kadang masyarakat ini mau terpropokasi gak tau juga dari mana sehingga gak mau dia percaya sama bapak kades ini. Istilahnya suuzhon ya pak”

IV. BADAN PEMUSYARATAN DESA HANDIS JULU

Nama : **PADA MULIA HASIBUAN**

Tanggal : **24 JULI 2023**

Pukul : **17.30 WIB**

Jabatan : **BPD DESA HANDIS JULU**

1. Bagaimana Kepala Desa membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Setau saya pak selaku ketua BPD, yaitu biar kompak membangun hubungan itu ya dengan musyawarah desa, buat beberapa pelatihan, pesta marpokat gitu pak”

2. Apakah Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Di lapangan itu, bapak kepala desa mengajak masyarakat untuk membangun desa karna kan pembangunan desa itu untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa itukan memotivasi ini mau dibangun jadi butuh kekompakan.”

3. Apakah pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Kalau menurut saya pak, kalau dari segi langsung ada yang berupa media, papan informasi, baliho dan saya rasa pakek itu tu sudah jelas pengumumannya”

4. Apakah media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa?

Jawaban:

“Di desa itu ada kami membuat semacam akun desa media sosial berupa Facebook. jadi masyarakat desa itu bisa mengakses itu langsung. Selain itu ada juga ditempli di kede kopi gitu pak”

5. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ada pak, banyak masyarakat kita yang memberikan usulan dan ide mereka ya itu tadi untuk kemajuan desa kami bersama juga kan pak. Jadi masyarakat nya pada apa itu namanya pak gampang di andalkan lah kalau kita bilang pak.”

6. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Terlibat pak, tapi lebih ke jasa mereka, ke tenaga lah kita bilang ya. Mereka sangat bersemangat kalau sudah pak kepala desa megajak untuk sama sama membangun gitu pak”

7. Adakah partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Kalau untuk saat ini belum ada pak, masih menyumbangkan tenaganya aja. Karna perekonomian kan juga lagi susah kan pak”

8. Adakah partisipasi masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“Setau saya ada masyarakat kami itu yang sekolah, kuliah itu disitu kami sesekali mengadakan kayak pelatihan advokat ada pelatihan kayak komputer gitu.”

9. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang diadakan kepala desa yang diikuti masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ada pak dibuat. Minimal kali itu pak 2 kali dalam sebulan itu pasti kami gotong royong pak”

10. Adakah partisipasi masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ada pak, masyarakat memberikan ide pemikirannya, mengikuti dan mengawal jalannya proses pelaporan dana desa ini yang di fasilitasi pak kades dari musdes sampek akhirnya terealisasi kegiatan-kegiatannya pak”

11. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Menurut saya pembangunan desa kita ini kan untuk kita semua, untuk kemajuan bersama. Sepertinya faktor pendorong itu karna bapak kades kami ini juga orangnya selalu ada untuk kami pak. Gak payah lah menghubunginya gitula pak”

12. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Kadang faktor waktu kadang masyarakat ada yg kerja, ada yang sekolah gitu. Menurut saya kurangnya kesadaran masyarakat desa dan kurangnya pemahaman juga bisa pak. Mereka gak tau hak dan tanggung jawab mereka dalam berpartisipasi.”

V. KEPALA DESA PAGARAN BARINGIN

Nama : **HUMALA LUBIS**
Tanggal : **26 JULI 2023**
Pukul : **09.00 WIB**
Jabatan : **KEPALA DESA PAGARAN BARINGIN**

1. Bagaimana Anda membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa?

Jawaban:

“Yaaa Saya akan selalu terbuka dan aktif lah terlibat dalam kegiatan masyarakat. Saya pun akan mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka serta mengajak mereka untuk berpartisipasi lah bis akita bilang gitukan dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan dana desa.”

2. Bagaimana Anda menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa?

Jawaban:

“Saya past ikan menyusun pesan yang jelas gitu, terarah juga lah untuk masyarakat desa agar mereka ini memahami kebutuhan mereka, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan juga menyampaikan informasi dengan singkat dan padat. Saya juga memastikan pesan saya selalu mengandung tujuan yang pas lah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.”

3. Bagaimana Anda memastikan pesan yang disampaikan dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Saya memastikan pesan yang disampaikan dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa dengan menyampaikan manfaat yang jelas dari program dan proyek yang didanai oleh dana desa, melibatkan mereka dalam

proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta menunjukkan dampak positif dari partisipasi mereka dalam pembangunan desa.”

4. Bagaimana Anda memastikan media yang digunakan dapat diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat desa?

“Ya kita pastikan media yang digunakan dapat diakses oleh sebanyak mungkin sama masyarakat desa dengan menggunakan beragam media komunikasi yang ada di desa, seperti penggunaan baliho, pengumuman di tempat umum, pertemuan langsung, dan media sosial whatsapp dan facebook”

5. Apa hambatan umum yang Anda hadapi dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Jawaban:

“Hmm minimnya akses informasi dan teknologi pak. Saya membuat pertemuan langsung, menyediakan informasi tertulis, dan penyuluhan untuk memastikan pesan sampai kepada semua lapisan masyarakat desa. Saya juga berusaha memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan relevan bagi mereka.”

6. Bagaimana Anda mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Saya mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa dengan mengadakan rapat musyawarah desa, pertemuan rutin, dan sosialisasi secara berkala. Saya juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui buku saran atau media komunikasi lainnya. Selain itu, saya aktif mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat untuk mendorong partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait dana desa.”

7. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya dengan mengadakan pertemuan lah atau forum diskusi untuk membahas proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Saya juga ngajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan kelompok-kelompok lokal untuk memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan fisik atau proyek yang didanai oleh dana desa.”

8. Apa upaya yang Anda lakukan untuk melibatkan masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Saya melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan manfaat partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material untuk pengelolaan dana desa. Selain itu, saya berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas sumbangan mereka.”

9. Bagaimana Anda mendorong masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“Ya dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan pertemuan yang fokus pada peningkatan keterampilan terkait pengelolaan dana desa. Saya juga mengajak mereka untuk menjadi fasilitator atau instruktur dalam kegiatan tersebut sehingga mereka dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman langsung kepada sesama masyarakat desa.”

10. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang Anda adakan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antar warga desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, kayak gotong-royong, perayaan bersama, dan pertemuan komunitas itulah dia pak untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antar warga desa ini, dalam pengelolaan dana desa jugakan. Kegiatan-kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antarwarga dan meningkatkan semangat partisipasi dalam pembangunan desa.”

11. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Dengan membuat rapat musyawarah desa, forum diskusi, dan pertemuan partisipatif. Kegiatan kek gitu kan kita jadi bisa mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam merumuskan rencana pengelolaan dana desa yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan desa.”

12. Bagaimana Anda memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan perencanaan?

Jawaban:

“Dengan monitoring dan evaluasi secara berkala pak. Disitu kita akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan proyek, mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait, dan berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat untuk memastikan bahwa semua tahapan sesuai gitukan denga napa Namanya aaa rencana dan mengatasi permasalahan yang muncul secara proaktif.”

13. Bagaimana Anda mengelola administrasi dan dokumentasi terkait dengan pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Saya mengelola administrasi dan dokumentasi terkait dengan pengelolaan dana desa dengan cermat dan sistematis. Saya melakukan pencatatan secara rapih

tentang alokasi dana, penggunaan anggaran, dan hasil proyek. Selain itu, saya menyimpan dokumen-dokumen terkait seperti laporan keuangan dan dokumen perencanaan dalam bentuk fisik dan digital agar mudah diakses dan diverifikasi. Saya menyusun laporan berkala tentang pengelolaan dana desa dengan jelas dan transparan.”

14. Bagaimana Anda menyusun laporan berkala tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pihak terkait?

Jawaban:

“Laporan ini berisi informasi tentang alokasi dana, penggunaan anggaran, kemajuan proyek, serta pencapaian yang telah dicapai. Laporan tersebut disampaikan secara rutin kepada masyarakat melalui pertemuan desa dan media sosial, serta kepada pihak terkait seperti pemerintah kabupaten atau lembaga terkait untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa.”

15. Bagaimana Anda memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat desa?

Jawaban:

“Saya memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa dengan mengadakan pertemuan terbuka untuk menyampaikan laporan keuangan dan kemajuan proyek kepada masyarakat desa. Selain itu, saya menerapkan sistem pengawasan internal dan eksternal yang ketat, melibatkan BPD (Badan Perwakilan Desa) dan pihak terkait untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan dana desa.”

16. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“1. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

2. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dana desa.
3. Kesadaran masyarakat tentang manfaat program dan proyek yang didanai oleh dana desa.”

17. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

- “1. Ketidakpercayaan terhadap kepala desa.
2. Konflik antarwarga atau dengan pihak desa.
3. Keterbatasan sumber daya seperti akses terbatas ke pendidikan, informasi, dan teknologi.”

VI. KAUR KEUANGAN DESA PAGARAN BARINGIN

Nama : **ASWAR EVENDI HASIBUAN**

Tanggal : **26 JULI 2023**

Pukul : **11.00 WIB**

Jabatan : **KAUR KEUANGAN DESA PAGARAN BARINGIN**

1. Bagaimana Kepala Desa membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa, Kepala Desa perlu berkomunikasi secara transparan, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. Pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan pengawasan internal juga penting dilakukan agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas program-program yang dijalankan.”

2. Apakah Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, Kepala Desa harus menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa agar dapat mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memastikan partisipasi serta dukungan mereka dalam program-program penggunaan dana desa.”

3. Apakah pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa jika pesannya mengandung inspirasi, tujuan yang jelas, manfaat bagi masyarakat, dan dukungan yang positif untuk partisipasi aktif mereka.”

4. Apakah media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa?

Jawaban:

“Ya, media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Media yang dipakai baliho, pengumuman di tempat umum, pertemuan langsung, atau media online kayak Whatsapp dan Facebook. sepertinya semua itu sudah cukup untuk diakses dan dimengerti warga”

5. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, partisipasi masyarakat dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa sangat penting. Keterlibatan aktif masyarakat memungkinkan adanya masukan beragam dan perspektif yang dapat memperkaya pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa dan memastikan kepentingan seluruh warga desa terakomodasi dengan baik.”

6. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat sering terlibat dalam kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa. Partisipasi mereka bisa berupa kontribusi tenaga kerja, pengawasan proyek, atau bahkan menjadi bagian dari tim pelaksana. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pelaksanaan proyek pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga desa.”

7. Adakah partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, dalam beberapa kasus, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa. Misalnya, masyarakat dapat menyumbangkan tanah atau tenaga kerja mereka untuk proyek pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Dengan berpartisipasi secara aktif dalam menyumbangkan aset dan sumber daya, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam memajukan desa mereka.”

8. Adakah partisipasi masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“Ya, partisipasi masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa dapat terjadi. Beberapa masyarakat desa mungkin memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus dalam bidang tertentu, seperti keuangan, konstruksi, pertanian, atau manajemen proyek. Mereka dapat berkontribusi dengan berbagi pengetahuan dan keterampilan ini untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring proyek yang

didanai oleh dana desa. Dengan berbagi keterampilan dan pengetahuan, masyarakat dapat memperkuat pengelolaan dana desa secara kolektif.”

9. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang diadakan kepala desa yang diikuti masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, Kepala Desa dapat mengadakan kegiatan atau acara sosial yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Misalnya, pertemuan komunitas, musyawarah desa, atau sosialisasi program pengelolaan dana desa. Kegiatan-kegiatan semacam itu dapat menjadi platform untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai proyek-proyek yang akan didanai oleh dana desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial semacam itu, Kepala Desa dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.”

10. Adakah partisipasi masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, partisipasi masyarakat dapat dimulai sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat ikut memberikan masukan, usulan, dan saran dalam tahap perencanaan proyek yang akan didanai oleh dana desa. Selama pelaksanaan proyek, masyarakat juga dapat terlibat dalam pelaksanaan fisik atau memberikan kontribusi berupa sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penatausahaan dan pelaporan pengelolaan dana desa. Mereka dapat memantau penggunaan dana, mengawasi pelaksanaan proyek, dan menyampaikan laporan atau pertanyaan terkait pengelolaan dana desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat penting dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program yang dilaksanakan”

11. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Keterlibatan dalam perencanaan, Kesadaran akan manfaat”

12. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Ha itulah dia Ketidakpercayaan terhadap kepala desa ini sering kali yakan terjadi atau juga sama pihak terkait, Minimnya juga kesempatan untuk berperan aktif, Ketidaktahuan tentang hak partisipasi”

VII. MASYARAKAT DESA PAGARAN BARINGIN

Nama : **MUHAMMAD PADELI NASUTION**

Tanggal : **26 JULI 2023**

Pukul : **13.30 WIB**

Jabatan : **MASYARAKAT DESA PAGARAN BARINGIN**

1. Bagaimana Kepala Desa membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Kepala Desa membangun hubungan kuat dengan masyarakat desa melalui transparansi, partisipasi aktif, komunikasi efektif, keterbukaan, kolaborasi, membangun kepercayaan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

2. Apakah Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa agar mereka memahami pentingnya partisipasi dan tanggung jawab dalam penggunaan dana desa.

3. Apakah pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa karena pesan tersebut memberikan pemahaman mengenai manfaat partisipasi aktif dan pentingnya peran mereka dalam mengelola dana desa.

4. Apakah media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa?

Jawaban:

“Ya, media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa agar informasi dan pesan dapat tersebar secara merata dan mudah dijangkau oleh semua warga desa.”

5. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat berpartisipasi dengan memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa untuk memberikan masukan dan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan partisipatif.”

6. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan program pembangunan lainnya.

7. Adakah partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat berpartisipasi dengan menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa, seperti tenaga kerja, lahan, bahan bangunan, dan peralatan.”

8. Adakah partisipasi masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat berpartisipasi dengan berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa, seperti pengalaman dalam proyek sebelumnya, keahlian dalam pembuatan anggaran, atau kemampuan dalam pelaporan keuangan.”

9. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang diadakan kepala desa yang diikuti masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, kepala desa dapat mengadakan kegiatan atau acara sosial, seperti pertemuan komunitas, lokakarya, atau diskusi terbuka, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan keterikatan masyarakat dengan program pengelolaan dana desa.”

10. Adakah partisipasi masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, partisipasi masyarakat biasanya dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa dapat melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana desa.”

11. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Inisiatif kepala desa, Kesadaran masyarakat, Dukungan organisasi lokal”

12. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Kurangnya transparansi, Ketidakpercayaan terhadap kepala desa, Keterbatasan akses informasi.

VIII. BPD PAGARAN BARINGIN

Nama : **AMWALI MUDA HARAHAHAP**

Tanggal : **26 JULI 2023**

Pukul : **15.00 WIB**

Jabatan : **BPD PAGARAN BARINGIN**

1. Bagaimana Kepala Desa membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Kepala Desa membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa melalui komunikasi terbuka, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mendengarkan aspirasi mereka, dan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan pengelolaan dana desa.”

2. Apakah Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa agar informasi dapat dipahami dengan baik dan tujuan pengelolaan dana desa dapat tercapai.”

3. Apakah pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Pesan yang disampaikan Kepala Desa memiliki potensi untuk memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa, tergantung pada cara penyampaian dan relevansi pesan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.”

4. Apakah media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa?

Jawaban:

“Ya, media yang digunakan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa sebaiknya dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa untuk memastikan informasi dan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua warga desa.”

5. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa. Partisipasi ini penting agar keputusan yang diambil lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat desa.”

6. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa. Mereka berkontribusi dalam pelaksanaan proyek dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur atau program pengembangan desa lainnya.”

7. Adakah partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat berpartisipasi dengan menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material yang mereka miliki untuk mendukung pengelolaan dana desa. Hal ini dapat berupa donasi dalam bentuk uang, barang, atau tenaga kerja sukarela untuk proyek-proyek desa yang dibiayai oleh dana desa.”

8. Adakah partisipasi masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat juga berpartisipasi dengan berbagi keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki dalam mengelola dana desa. Mereka dapat memberikan ide, saran, atau pengalaman praktis yang berguna dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dana desa. Keterlibatan ini membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut”

9. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang diadakan kepala desa yang diikuti masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, kepala desa sering mengadakan kegiatan atau acara sosial seperti musyawarah desa, pertemuan komunitas, atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dalam acara ini, masyarakat dapat memberikan masukan, menyampaikan ide, dan berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa. Ini memungkinkan kepala desa untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat dan memastikan partisipasi mereka dalam mengelola dana desa.”

10. Adakah partisipasi masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, dalam pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat dimulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Masyarakat berperan aktif dalam merumuskan rencana penggunaan dana desa, melaksanakan proyek atau kegiatan yang telah direncanakan, membantu dalam penatausahaan keuangan, serta terlibat dalam pelaporan hasil dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat penting dalam seluruh siklus pengelolaan dana desa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program-program yang dilaksanakan.”

11. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Manfaat nyata bagi masyarakat, Forum partisipatif terbuka, Kepemimpinan partisipatif”

12. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Keterbatasan akses informasi, Ketidakpercayaan terhadap kepala desa atau pemerintah desa, Kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi”

IX. KEPALA DESA SIALAMBUE

Nama : **AKHIRON HABIBI HASIBUAN**

Tanggal : **28 JULI 2023**

Pukul : **10.00 WIB**

Jabatan : **KEPALA DESA SIALAMBUE**

1. Bagaimana Anda membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa?

Jawaban:

“Membangun hubungan kuat dengan masyarakat desa melalui komunikasi terbuka, kepercayaan, kemitraan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.”

2. Bagaimana Anda menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa?

Jawaban:

“Saya akan mendengarkan dengan seksama kebutuhan dan masalah masyarakat desa agar pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka.”

3. Bagaimana Anda memastikan pesan yang disampaikan dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“saya akan berupaya menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Pertama-tama, saya akan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa dengan mendengarkan

secara aktif pandangan mereka. Dari sini, saya dapat mengidentifikasi isu-isu utama yang menjadi perhatian mereka terkait pengelolaan dana desa.”

4. Bagaimana Anda memastikan media yang digunakan dapat diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat desa?

“Untuk memastikan media yang digunakan dapat diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat desa, sebagai kepala desa, saya menggunakan media yang sudah ada di desa, seperti pengeras suara, papan pengumuman, dan baliho. Selain itu, saya akan memanfaatkan media sosial whatsapp dan facebook. Konten informasi akan dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Saya juga melibatkan para relawan dan pemuka masyarakat desa untuk membantu menyampaikan informasi kepada warga lainnya. Rutin mengadakan pertemuan dengan masyarakat juga akan mencari cara untuk berdiskusi dan memberikan update mengenai pengelolaan dana desa.”

5. Apa hambatan umum yang Anda hadapi dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Jawaban:

“Hambatan umum yang saya hadapi dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa adalah tingkat literasi dan akses terhadap teknologi yang terbatas. Untuk mengatasinya, saya akan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar pesan dapat sampai dengan baik. Selain itu, saya akan memanfaatkan media tradisional seperti pengeras suara dan papan pengumuman untuk menyampaikan informasi kepada mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi modern. Saya juga akan mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan dan menyelesaikan masalah secara partisipatif.”

6. Bagaimana Anda mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Saya akan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengadakan pertemuan terbuka secara rutin untuk mendengarkan ide, usulan, dan saran dari mereka. Selain itu, saya juga akan mengirimkan surat undangan dan mengumumkan kegiatan melalui media yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Selama pertemuan, saya akan menciptakan suasana yang ramah dan terbuka sehingga masyarakat merasa nyaman untuk berbicara dan berkontribusi. Saya juga akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas kontribusi mereka agar semakin banyak yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.”

7. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Saya akan melibatkan masyarakat dengan secara aktif mengundang mereka untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa. Saya akan mengadakan pertemuan terbuka dan diskusi kelompok dengan masyarakat desa untuk mendengarkan aspirasi mereka dan mengumpulkan ide-ide untuk proyek yang diinginkan. Selain itu, saya juga akan membentuk tim atau kelompok kerja yang terdiri dari warga desa untuk menjadi bagian dari pelaksanaan proyek, sehingga masyarakat merasa memiliki dan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.”

8. Apa upaya yang Anda lakukan untuk melibatkan masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Saya akan aktif berkomunikasi dengan masyarakat untuk memahami aset, sumber daya, dan bahan material yang dimiliki oleh mereka. Saya akan mengadakan pertemuan dan dialog terbuka untuk menjelaskan manfaat dari partisipasi mereka dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset dan sumber daya untuk pengelolaan dana desa. Selain itu, saya akan memberikan

informasi tentang penggunaan dana desa dan bagaimana sumbangan mereka dapat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan desa. Saya juga akan mencari cara-cara kreatif untuk mendorong partisipasi, seperti memberikan insentif atau penghargaan bagi warga desa yang berkontribusi secara aktif.”

9. Bagaimana Anda mendorong masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“Saya akan mengadakan workshop, pelatihan, atau pertemuan reguler untuk masyarakat desa dengan tujuan berbagi keterampilan dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa. Saya akan mengidentifikasi warga desa yang memiliki keahlian khusus dan meminta mereka untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan tersebut. Selain itu, saya akan menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tanpa rasa takut atau malu. Dengan cara ini, saya berharap partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa dapat meningkat dan memberikan manfaat positif bagi seluruh desa.”

10. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang Anda adakan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antar warga desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, saya mengadakan acara sosial seperti gotong royong, pertemuan komunitas, atau kegiatan kebersamaan lainnya yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antar warga desa dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, saya juga memanfaatkan momen-momen penting seperti perayaan hari raya atau acara khusus lainnya sebagai kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan dan memupuk semangat kerja sama dalam pengelolaan dana desa.”

11. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Saya akan mengadakan pertemuan partisipatif dengan masyarakat desa untuk mendiskusikan rencana pengelolaan dana desa. Selama pertemuan tersebut, saya akan mendengarkan ide, usulan, dan masukan dari masyarakat mengenai kebutuhan dan prioritas penggunaan dana desa. Saya juga akan mendorong partisipasi aktif dari warga desa dalam merumuskan rencana dan membuat keputusan bersama. Dengan demikian, masyarakat akan merasa terlibat secara langsung dalam proses perencanaan dan memiliki peran dalam menentukan arah pengelolaan dana desa.”

12. Bagaimana Anda memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan perencanaan?

Jawaban:

“Saya akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Saya akan berkoordinasi dengan tim pelaksana dan masyarakat desa untuk mengawasi kemajuan dan mengatasi kendala yang mungkin timbul. Jika ada perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan, saya akan melibatkan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, saya berusaha untuk menjaga agar program dan kegiatan berjalan dengan efisien dan efektif.”

13. Bagaimana Anda mengelola administrasi dan dokumentasi terkait dengan pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Saya akan memastikan bahwa administrasi dan dokumentasi terkait pengelolaan dana desa dilakukan dengan rapi dan akurat. Saya akan membentuk tim yang bertanggung jawab untuk mengurus administrasi dan menyimpan dokumen dengan baik. Selain itu, saya akan memberikan pelatihan kepada staf

dan masyarakat desa tentang pentingnya administrasi yang tepat guna dan bagaimana mengelola dokumentasi dengan benar. Dengan demikian, semua data terkait pengelolaan dana desa dapat diakses dengan mudah dan transparan.”

14. Bagaimana Anda menyusun laporan berkala tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pihak terkait?

Jawaban:

“Saya akan menyusun laporan berkala tentang pengelolaan dana desa secara terperinci dan mudah dipahami. Laporan tersebut akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat desa dan pihak terkait, seperti pemerintah kabupaten atau lembaga yang terkait dengan penggunaan dana desa. Dalam laporan tersebut, akan mencakup informasi tentang penggunaan dana, proyek-proyek yang telah dilaksanakan, pencapaian hasil, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, masyarakat dan pihak terkait dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dana desa telah digunakan dan manfaat yang telah dihasilkan.”

15. Bagaimana Anda memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat desa?

Jawaban:

“Saya akan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan mereka terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.”

16. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi jika mereka merasa didorong dan diberdayakan untuk berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pengelolaan dana desa.”

17. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Terkadang, masyarakat dan pihak pemerintah desa memiliki perbedaan pandangan mengenai tujuan dan prioritas pengelolaan dana desa, yang dapat menghambat partisipasi masyarakat.”

X. KAUR KEUANGAN DESA SIALAMBUE

Nama : **MUHAMMAD SHOLEH HASIBUAN**

Tanggal : **28 JULI 2023**

Pukul : **12.00 WIB**

Jabatan : **KAUR KEUANGAN DESA SIALAMBUE**

1. Bagaimana Kepala Desa membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan mereka merasa memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan.”

2. Apakah Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, Kepala Desa menyusun pesan yang jelas untuk masyarakat desa. informasi yang transparan tentang alokasi dana, program yang akan dilaksanakan, dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.”

3. Apakah pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa jika pesan tersebut mengandung komitmen untuk kemajuan desa, menggugah rasa tanggung jawab bersama, dan menunjukkan manfaat positif dari partisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa. Pesan yang inspiratif dan memberikan pemahaman tentang pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan desa akan meningkatkan motivasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.”

4. Apakah media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa?

Jawaban:

“Ya, memang media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa sebaiknya dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Upaya harus dilakukan untuk memastikan media yang dipakainya dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan akses teknologi kan banyak juga tu. Dengan kek gitukan, informasi terkait pengelolaan dana desa dapat disampaikan secara merata dan transparan kepada seluruh masyarakat desa.”

5. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa. Partisipasi ini penting untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kepala Desa dapat mendorong aktifitas partisipasi ini dengan mengadakan pertemuan, dialog, atau forum terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk berbicara dan memberikan masukan mereka.”

6. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa. Mereka dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek fisik, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sarana publik, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan desa, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek tersebut.”

7. Adakah partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, dalam beberapa kasus, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material yang mereka miliki untuk pengelolaan dana desa. Misalnya, mereka dapat menyumbangkan tanah atau tenaga kerja untuk proyek pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan atau gedung publik. Kontribusi semacam ini dapat meningkatkan efisiensi dan berhasilnya proyek serta memperkuat ikatan sosial antara masyarakat dan pemerintah desa.”

8. Adakah partisipasi masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“Ya, partisipasi masyarakat dalam berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa dapat terjadi. Masyarakat desa yang memiliki keahlian khusus atau pengetahuan tertentu dapat berkontribusi dengan memberikan saran, pelatihan, atau bimbingan kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Misalnya, mereka yang memiliki latar belakang keuangan dapat membantu dalam penatausahaan keuangan, sementara yang

berpengalaman dalam proyek fisik dapat memberikan wawasan tentang manajemen proyek. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan memberdayakan masyarakat dalam prosesnya.”

9. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang diadakan kepala desa yang diikuti masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, kepala desa biasanya mengadakan pertemuan atau acara sosial dengan masyarakat untuk membahas pengelolaan dana desa. Musdes itu pak.”

10. Adakah partisipasi masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam seluruh proses pengelolaan dana desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, masyarakat harus dilibatkan secara aktif. Partisipasi mereka membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa”

11. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran dan proyek-proyek desa, sehingga kebutuhan dan aspirasi mereka dapat diwujudkan.”

12. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah desa”

XI. MASYARAKAT DESA SIALAMBUE

Nama : **PANGADILAN NST**
Tanggal : **28 JULI 2023**
Pukul : **14.20 WIB**
Jabatan : **MASYARAKAT DESA SIALAMBUE**

1. Bagaimana Kepala Desa membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dana desa adalah kunci untuk membangun keterlibatan aktif. Dengan mendengarkan aspirasi dan masukan dari kami, keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kami”

2. Apakah Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Eee iya cukup jelas pak, karna kan mencakup semua dia udah informasinya juga transparan tentang anggaran dan penggunaan dana desa, terus pun juga ditekankan pak kades partisipasi aktif masyarakat.”

3. Apakah pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Karna jelas tadi itu pak, jadi kami termotivasi mau tau lah kami jadinya karna partisipasi kami juga dibutuhkan kan”

4. Apakah media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa?

Jawaban:

“Saya pikir bisa pak. Karna dibuatkan pak kades pakek baliho besar kan terus juga di letakkan juga program yang lagi di jalankan itu di facebook pak”

5. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Pasti pak, karna jelas tadi itu tujuannya, manfaatnya kan jadi kami mau ada andil dan ngasih usulan misal kan jalan kita harus bagus biar perekonomian juga lancar kan pak membawa hasil tani ke luar desa”

6. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ooohh kemarin itu terlibat kami pak waktu buat bronjong itu. Ya membantu sikit sikit. Terlibat itu berarti kan pak”

7. Adakah partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Kami masih swadaya tenaga dan pikiran kami aja sih pak, belum sanggup untuk nyumbang yang lain”

8. Adakah partisipasi masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“Ada, tapi gak banyak pak, paling kalau kayak kita mau ngerjai proyek paling teknis nya bagus nya kayak mana kayak gitu aja sih pak”

9. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang diadakan kepala desa yang diikuti masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ada pak, kami selalu gotong royong pak, kalau ngomongin dana desa musdes dibuat pak kades. Kalau kegiatan kemarin ada juga yang 1 muharram itu pak kegiatan”

10. Adakah partisipasi masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Pokoknya pak, mulai dari awal sampek akhir mengenai dana desa ini pasti kami selalu dikumpulkan sama pak kades untuk ngomongin itu. Semua di jelaskan sama kami”

11. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Eee transparan pak kades sepertinya satu satunya faktor pendorong menurut saya pak”

12. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Terkadang mau ada provokator gitu pak, itu jadi terpengaruh masyarakat yang lain”

XII. BPD SIALAMBUE

Nama : **ERMIAN SULESTI**

Tanggal : **28 JULI 2023**

Pukul : **16.00 WIB**

Jabatan : **BPD SIALAMBUE**

1. Bagaimana Kepala Desa membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Kepala Desa peka sama keadaan sekitar pak, maksudnya kepala desa gak acuh dia pak sama keadaan. Peduli lah kita bilang. Karna dia kek gitu kita pun kan respek sama pak kades ini”

2. Apakah Kepala Desa menyusun pesan yang jelas, terarah, dan relevan untuk masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Menurut saya, sudah sangat jelas pak. Karna masyarakat memahami apa tujuan dan manfaat dari program yang dibuat dan di jalankan”

3. Apakah pesan yang disampaikan Kepala Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Pak Kades ini gini pak, ringan beliau mengapresiasi apa yang dibuat warga. Jadi warga pun merasa di hargai jadi selalu terus mengikuti alur pengelolaan dana desa ini”

4. Apakah media yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa?

Jawaban:

“Saya rasa dapat di akses semuanya. Karna pak kades buat spanduk baliho besar gitu pak. Ada juga yang dari media sosial. Karna sekarang setiap desa kan harus punya facebook pak. Disitulah di muat semuanya kegiatan kegiatan disitu juga di letak”

5. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide, usulan, atau saran terkait pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Seperti yang saya bilang tadi pak, warga sini bersemangat kali kalau udah musdes, atau di panggil kades. Setiap orang punya usulan”

6. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik atau proyek-proyek pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Dilibatkan pak sama pak kades. Bagi yang ada waktu pasti dia bergabung, kalau yang kerja, ya kerja lah dia”

7. Adakah partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan atau mengalokasikan aset, sumber daya, atau bahan material mereka untuk pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Ha kalau ini belum ada pak, berat kayaknya kalau yang itu ya pak”

8. Adakah partisipasi masyarakat untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dana desa?

Jawaban:

“Ini ada, ada disini yang PNS juga kan pak, memberikan saran lah dia bagaimana baiknya dana desa ini karna kan cukup sulit juga”

9. Apakah ada kegiatan atau acara sosial yang diadakan kepala desa yang diikuti masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Kalau pertemuan dalam pengelolaan dana desa musdes lah pak. Kalau kegiatan terakhir kali kami buat acara 1 muharram kemarin itu pak”

10. Adakah partisipasi masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban:

“Masyarakat semua terlibat di setiap proses nya pak. Karna pak kades itu tadi kan pak orangnya menghargai orang lain. Jadi masyarakat juga segan menolak untuk gak berpartisipasi”

11. Apa sajakah Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Sikap pembawaan diri pak kades, beliau juga transparan dalam ngasi info info, terbuka juga sama warga”

12. Apa sajakah Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

Jawaban:

“Walaupun gitu pun pak, ada juganya yang gak suka sama pak kades sehingga beda pendapat dan kadang menimbulkan konflik. Jadi kan masyarakat yang lain ada yang terikut”



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Rasa tanggung jawab yang tinggi

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 1195/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2023
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 06 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

Kepada Yth :
Kecamatan Barumon
Kabupaten Padang Lawas
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat memberikan izin melakukan riset kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RAHMAT SUTAN SIREGAR
NPM : 2120040009
Prodi : Magister Ilmu Komunikasi
Judul Tesis : STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.



Prof. Dr. Eddy S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Cc. File





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
JLN.SISINGAMANGARAJA NO.1
SIBUHUAN

KodePos : 22763

Nomor : 423.4/297/KEC-07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Melakukan Riset**

Sibuhuan, 31 Juli 2023
Kepada:
Yth. **Direktur Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
Program Pasca Sarjana**
Di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1195/II 3.AU/UMSU-PPs/F/2023, tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **RAHMAT SUTAN SIREGAR**
NPM : 2120040009
Prodi : Magister Ilmu Komunikasi

Telah selesai melakukan riset Pada Desa di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas dengan judul tesis :

"STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS"

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

An. **CAMAT BARUMUN**
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

ANNA LELY NASUTION
Penata Tk. I III/d
NIP. 19660905 198903 2 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Sukri Pohan
Jabatan : Kepala Desa Handis Julu
2. Nama : ABD. Karim Nasution
Jabatan : Kaur Keuangan Desa Handis Julu
3. Nama : Pada Mulia hasibuan
Jabatan : BPD
4. Nama : M. SOLEH HSB
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

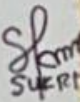
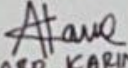
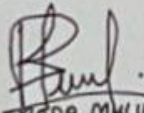
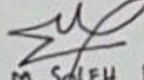
- Nama : Rahmat Sutan Siregar
NPM : 2120040009
Prodi : Magister Ilmu Komunikasi

Menyatakan mahasiswa di atas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Juli – 7 Agustus 2023, bertempat di Desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dalam rangka melengkapi data penelitian tesis yang berjudul Strategi Komunikasi Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Handis Julu, 24 JULI 2023

Informan

1. 
SUKRI POHAN
2. 
ABD. KARIM NASUTION
3. 
PADA MULIA HSB
4. 
M. SOLEH HSB



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Humala Lubis
Jabatan : Kepala Desa Pagaran Baringin
2. Nama : Aswar Evendi Hasibuan
Jabatan : Kaur Keuangan Desa Pagaran Baringin
3. Nama : Amwali Muda Harahap
Jabatan : BPD
4. Nama : Muhammad Padeli NST
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

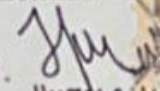

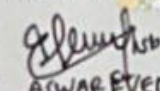
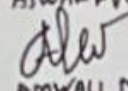
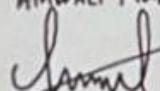
- Nama : Rahmat Sutan Siregar
NPM : 2120040009
Prodi : Magister Ilmu Komunikasi

Menyatakan mahasiswa di atas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Juli – 7 Agustus 2023, bertempat di Desa Pagaran Baringin Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dalam rangka melengkapi data penelitian tesis yang berjudul Strategi Komunikasi Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pagaran Baringin, 26 Juli 2023

Informan

1. 
HUMALA LUBIS

2. 
ASWAR EVENDI HSB
3. 
AMWALI MUDA HRP
4. 
MHD PADALI NST

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **AHIRON HABIBI HASIBUAN**
Jabatan : Kepala Desa Sialambue
2. Nama : **MUHAMMAD SHOLEH HSB**
Jabatan : Kaur Keuangan Desa Sialambue
3. Nama : **ERMIAN SULESTI**
Jabatan : BPD
4. Nama : **PANGADILAN NST**
Jabatan : MASYARAKAT

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

- Nama : Rahmat Sutan Siregar
NPM : 2120040009
Prodi : Magister Ilmu Komunikasi


Menyatakan mahasiswa di atas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Juli – 7 Agustus 2023, bertempat di Desa Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dalam rangka melengkapi data penelitian tesis yang berjudul Strategi Komunikasi Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

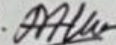
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sialambue, 28 JULI 2023

Informan

1.


AHIRON HABIBI HSB

2. 

MUHAMMAD SOLEH HSB

3. 

ERMIAN SULESTI HSB

4. 

PANGADILAN NST

DOKUMENTASI WAWANCARA



(Sumber: Informan Kepala Desa Handis Julu Bapak Sukri Pohan, Senin/ 24 Juli 2023 Pukul 11.00 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Handis Julu)



(Sumber: Informan Kaur Keuangan Desa Handis Julu Bapak Abd. Karim Nasution, Senin/ 24 Juli 2023 Pukul 14.00 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Handis Julu)



(Sumber: Informan Masyarakat Desa Handis Julu Bapak M. Soleh Hasibuan Senin/ 24 Juli 2023 Pukul 16.00 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Handis Julu)



(Sumber: Foto bersama dengan informan Senin/ 24 Juli 2023 Pukul 16.00 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Handis Julu)



(Sumber: Informan Kepala Desa Pagaran Baringin Bapak Humala Lubis, Rabu/ 26 Juli 2023 Pukul 09.00 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Pagaran Baringin)



(Sumber: Informan Kaur Keuangan Desa Pagaran Baringin Bapak Aswar Evendi Hasibuan, Rabu/ 26 Juli 2023 Pukul 11.00 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Pagaran Baringin)



(Sumber: Informan Masyarakat Desa Pagaran Baringin Bapak Muhammad Padeli Nst, Rabu/ 26 Juli 2023 Pukul 13.30 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Pagaran Baringin)



(Sumber: Informan BPD Desa Pagaran Baringin Bapak Amwali Muda Harahap, Rabu/ 26 Juli 2023 Pukul 15.00 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Pagaran Baringin)



(Sumber: Foto bersama dengan informan Desa Pagaran Baringin, Rabu/ 26 Juli 2023 Pukul 16.00 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Pagaran Baringin)



(Sumber: Informan Kepala Desa Sialambue Bapak Akhiron Habibi Hasibuan, Jumat/ 28 Juli 2023 Pukul 10.00 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Sialambue)



(Sumber: Informan Kaur Keuangan Desa Sialambue Bapak Muhammad Sholeh Hasibuan, Jumat/ 28 Juli 2023 Pukul 12.00 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Sialambue)



(Sumber: Informan Masyarakat Desa Sialambue Bapak Pangadilan Nst, Jumat/ 28 Juli 2023 Pukul 14.20 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Sialambue)



(Sumber: Informan BPD Sialambue Bapak Ermian Sulesti, Jumat/ 28 Juli 2023 Pukul 16.00 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Sialambue)



(Sumber: Foto bersama informan Desa Sialambue, Jumat/ 28 Juli 2023 Pukul 16.30 Wib, Lokasi Kantor Kepala Desa Sialambue)